

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI ALOKASI
DANA DESA**

**(Studi Tentang Peran PKK Di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo)**

Skripsi



Oleh:

HILMI ROCHMAYANTI

NIM: 112020100001

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2015

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI ALOKASI DANA DESA

**(Studi Tentang Peran PKK Di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo)**

Usulan Penelitian

Diajukan sebagai tahap awal dalam penyusunan Skripsi pada Program

Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Oleh :

HILMI ROCHMAYANTI

NIM : 112020100001

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2015

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Pembimbing
Lampiran : 4 eksemplar skripsi
Perihal : Naskah Skripsi

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas FISIP
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan, evaluasi serta perbaikan dan penyempurnaan terhadap skripsi atas nama saudara:

Nama : Hilmi Rochmayanti
NIM : 112020100001
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Judul : Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa (Studi Tentang Peran PKK Di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini telah cukup lengkap untuk diujikan dalam rangka menyelesaikan studi tingkat Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

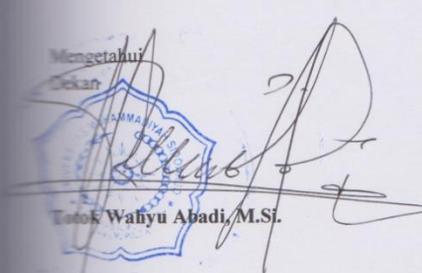
Berkaitan tersebut diatas, dengan ini kami ajukan skripsi ini pada fakultas untuk diuji dengan segera.

Demikian atas kebijaksanaan ibu, kami sampaikan terima kasih.

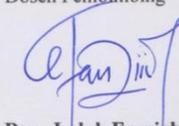
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, 2 Juli 2015

Mengetahui
Dekan


Toto Wahyu Abadi, M.Si.

Dosen Pembimbing


Dr. Dra. Luluk Fauziah, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa (Studi Tentang Peran PKK di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)” adalah hasil karya murni pemikiran peneliti bukan hasil tiruan atau duplikasi dari tulisan lain terkecuali adanya kutipan-kutipan ataupun pernyataan sebagaimana telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah pada umumnya.

Peneliti bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan peraturan akademis fakultas apabila terbukti karya ini tidak sesuai dengan pernyataan yang saya buat. Adapun selanjutnya keseluruhan isi, ide serta gagasan dalam karya ilmiah ini sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis

Sidoarjo, 2 Juli 2015



Hilmi Rochmayanti

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa (Studi Tentang Peran PKK Di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)” ini, telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi:

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

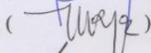
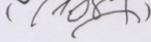
Pada

Hari Kamis

Tanggal 13 Agustus 2015

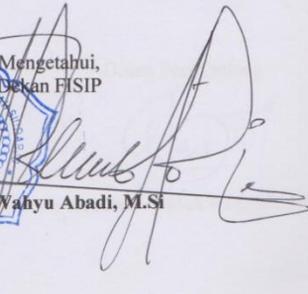
Bertempat di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Dewan Penguji:

- | | | |
|----------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Dra. Luluk Fauziah, M.Si. | () |
| 2. Penguji I | : Dra. Isnaini Rodyah, M.Si. | () |
| 3. Penguji II | : Dra. Arsyiah, M.Si. | () |
| 4. Penguji III | : Isna Fitria Agustina, M.Si. | () |

Mengetahui,
Dekan FISIP




Totok Wahyu Abadi, M.Si

MOTTO

خير الـ ناس انـ فـعهم لـ الـ ناس

“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi syukur atas kehadiran Allah SWT karena rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan melalui Alokasi Dana Desa (Studi Tentang Peran PKK Di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo),” adapun tujuan dari penulisan kripsi ini adalah untuk diajukan sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terma kasih kepada:

1. Dr. Hidayatullah, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2. Totok Wahyu Abadi, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan ijin penelitian
3. Ainur Rochmaniah, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan untuk ujian skripsi.
4. Dr. Dra. Luluk Fauziah, M.Si. selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan kerelaan hati untuk memberikan bimbingan, nasehat petunjuk, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
6. Bapak Karnoto dan Ibu Tasrifah selaku Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK, serta semua jajaran Pemerintah dan PKK Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang semuanya menjadi pembimbing selama penulis melakukan penelitian.

7. Bapak H. Abdul Manan (Alm) dan Ibu HJ. Anisah sebagai orang tua saya yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a dorongan, semangat, dan menjadi inspirasi dalam setiap langkahku.
8. HJ. Ning Zahro (Alm) sebagai nenek yang selalu memberikan semangat menuntut ilmu ketika beliau masih hidup
9. Adekku (Izattia Suci Aji Ilahi dan Mirza Atia Nur Fianah), yang senantiasa mendoakan agar cepat lulus, terima kasih atas dukungannya dan motivasinya.
10. Saudaraku yang juga selalu memberikan motivasi Kharizha Krishnandya,SH dan Giovani,SH. Yang selalu menginspirasi dalam berkarya.
11. Teman-teman satu perjuanganku dalam bangku kuliah yang telah banyak memberikan bantuan selama kuliah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan membawahkan wawasan bagi semua pihak.

Sidoarjo, 14 Juni 2015

Penulis

ABSTRAK

Pemberdayaan adalah salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberdayaan perempuan adalah salah satu program pemberdayaan di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh peran PKK dan masyarakat bekerjasama dengan pemerintah Desa.

Pemberdayaan perempuan adalah salah satu program pemerintah Desa yang bertujuan untuk memberikan pemberdayaan bagi perempuan-perempuan Desa . Pemberdayaan ini berupaya memberikan kemandirian perempuan untuk berkarya dengan menciptakan program-program dan pelatihan khusus untuk perempuan di Desa. Pemberdayaan perempuan ini menggunakan ADD dari pemerintah serta peran PKK.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dari ADD yang dilaksanakan di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo . metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan nyata dan sejelas mungkin dari pemberdayaan perempuan melalui alokasi dana desa (ADD) yang telah dilaksanakan Desa Sidodadi. Hasil dari penelitian tentang pemberdayaan perempuan melalui alokasi dana Desa adanya kegagalan program yang ditentukan dua kondisi yaitu faktor pendukung dan penghambat.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Perempuan, Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

ABSTRACT

Empowerment is one of the government's strategy to help the country become self-sufficient and autonomous by giving the Village Fund Allocation (ADD). Empowerment of women is one of the empowerment program in the village of Candi region Sidodadi Sidoarjo. The implementation of the empowerment of women executed by the PKK and the role of society in cooperation with the village government.

Empowerment of women is one of the village government program that aims to memberikan empowerment for village women. It seeks to provide independence empowerment of women to work by creating programs and special training for women in the village. This women's empowerment using the ADD of government and the role of the PKK.

The aim of the study is to examine women's empowerment of ADD held in the village of Candi region Sidodadi Sidoarjo. the method used in this research is qualitative descriptive and provide a description or explanation on a real situation and clear as possible of the empowerment of women through the allocation of village funds (ADD) which has been implemented Sidodadi village. Results of research on women's empowerment through the village fund allocation failure adanaya program specified two conditions, namely enabling and inhibiting factors.

Keywords: Allocation Village Funds, Women's Empowerment, Women's Empowerment, Family Welfare Empowerment.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	5
1.3 Tujuan.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
2.1.1Pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana (ADD)	8

2.1.2 Peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mendukung program-program Pemerintah Kota Bandung	9
2.1.3 Analisis APBD Responsif Gender Sektor Pemberdayaan dan Perlindungan anak di Kabupaten Situbondo	9
2.1.4 Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui..... Pengembangan Manajemen Usaha Kecil.....	10
2.1.5 Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar	11
2.1.6 Rangkuman Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan	14
2.2.1.1 Tahap Pemberdayaan	20
2.2.1.2 Indikator Keberdayaan	25
2.2.1.3 Pemberdayaan Perempuan	28
2.2.1.4 Faktor-faktor Adanya Pemberdayaan Perempuan	35
2.2.2 Alokasi Dana Desa	36
2.2.3 PKK.....	41
2.2.4. Aar Kerangka Berikif.....	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Fokus Penelitian	44
3.4. Penentuan Informan.....	44
3.5 Jenis dan Sumber Data	45
3.5.1 Data Primer	46
3.5.2 Data Sekunder.....	46
3.6 Penentuan Subyek Penelitian	46
3.7 Teknik Analisis Data	47
BAB IV PENGANALISISAN DATA DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Obyek Penelitian.....	50
4.1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidodadi.....	51
4.1.2 Profil PKK Sidodadi.....	51
4.2 Temuan Hasil Penelitian.....	59
4.2.1 Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa	59
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat	68

4.3 Pembahasan Penelitian	73
4.3.1 Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa.....	73
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Melalui ADD.....	76
BAB V PENUTUP	79
5.1 Simpulan	79
5.2 Saran-Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perempuan merupakan sumber daya manusia yang mempunyai potensi yang dapat didayagunakan dalam berbagai bidang sektor pembangunan nasional. Populasi penduduk perempuan Indonesia yang terus bertambah, pada sudut pandang tertentu sering dianggap menjadi masalah kependudukan. Budaya yang masih terkonsentrasi tradisional yang membuat persepsi perempuan merupakan manusia yang lemah yang menjadikan tekanan sosial yang selalu mengakar

Peran perempuan dalam proses pembangunan di Indonesia sangat penting karena dapat meningkatkan ekonomi, meminimalisir angka kematian ibu ketika melahirkan. Perempuan merupakan sosok penting dalam keberhasilan pembangunan bangsa, namun apabila melihat kasus-kasus yang terjadi pada perempuan maka dengan demikian perempuan-perempuan tersebut harus senantiasa diberdayakan sesuai dengan latar belakang profesi, dan pengalamannya agar mereka bisa mandiri dan punya kuasa dalam hidupnya. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender adalah prasyarat untuk mencapai keamanan politik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup bagi semua rakyat. Pemberdayaan perempuan tersebut bisa di laksanakan melalui desa.

Desa merupakan tingkatan pemerintah yang paling dasar dari segala pemerintah yang ada di Indonesia. Walaupun titik fokus ekonomi daerah berada pada tingkat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi dana (Oni Nugrianti dan Zulkarnain:2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa melalui alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana yang menjadi informan penelitian adalah aparat yang terlibat dalam program ADD, tokoh masyarakat dan tokoh cerdik pandai yang mengetahui program ADD. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan lancar atau kurang efektif, sedangkan faktor yang dominan mempengaruhinya adalah faktor ketakutan.

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan (*deskriptif*) dan menjelaskan (*explanatory* atau *confirmatory*) tentang fenomena efektivitas pemberdayaan masyarakat desa melalui ADD

diKabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masayang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana efektivitas pemberdayaan masyarakat desa melalui ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2.1.2 Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang. (Ramandita Shalfiah:2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi peran PKK sebagai fasilitator dan penyuluh dalam mendukung program-program pemerintah Kota Bontang sudah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa masukan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan PKK untuk mendukung program pemerintah Kota Bontang, tetapi karena berjalannya kegiatan penyuluhan dalam memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam hal pendidikan, ekonomi dan kesehatan dapat membantu meminimalisir masalah tersebut.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa peran PKK sebagai fasilitator untuk masyarakat dalam penghubung dan penggerak belum optimal karena dapat dilihat tidak adanya sekretariat PKK di beberapa Kecamatan maupun Kelurahan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berorganisasi. Ini disebabkan karena ada berbagai macam alasan seperti tidak adanya waktu masyarakat untuk ikut

melaksanakan kegiatan PKK, tidak adanya imbalan dana dalam setiap kegiatan PKK yang merupakan tidak ada untungnya buat mereka, dan tidak adanya transportasi untuk menuju lokasi pelaksanaan kegiatan PKK. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya peran PKK di dalam keluarga juga kurang optimal, inilah sebab mengapa mereka belum paham akan pentingnya kegiatan berorganisasi khususnya untuk pelaksanaan 10 Program PKK.

2.1.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) (Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo: 2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor

pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh Milles dan Huberman dalam Sugiono (2009, h.16) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sedangkan situs penelitian adalah pemerintah Desa Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa. Fokus dalam penelitian ini adalah: pertama, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa, yang terdiri dari: a) Perencanaan ADD. b) Penganggaran ADD. c) Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD. d) Penggunaan ADD. e) Pengawasan ADD. f) Pertanggung-jawaban ADD. Kedua, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.4 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Kota Malang: Dalam Perspektif Kajian Budaya (Trisakti Handayani, I Gede Parimatha, Keppi Sukesi, I Wayan Ardika, M.A.)

Penelitian ini merumuskan temuan baru dalam penelitian ini adalah: (1) paradigma pemberdayaan yang dikembangkan PKK mengisyaratkan terjadinya perubahan organisasi menuju pada kemandirian, meskipun belum dilakukan secara optimal, karena kekuasaan tetap melakukan pengontrolan, sehingga hubungan yang terjalin antara kekuasaan dengan PKK adalah hegemoni; (2) eksistensi PKK memberi wadah kepada perempuan untuk beraktivitas dalam kecenderungan koridor kekuasaan (laki-laki); (3) PKK di kota Malang telah melakukan upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender, yang diperlihatkan dengan keterlibatan laki-laki dalam kepengurusan, meskipun eksistensinya belum berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program organisasi, karena PKK masih berorientasi pada kebijakan dari atas (*top down*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan meliputi: observasi partisipasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil lokasi di kota Malang. Subjek penelitian adalah PKK kota Malang, kecamatan Lowokwaru dan kelurahan Lowokwaru.

2.1.5 Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya) (Dimas Alif Budi N., M. Saleh Soeaidy, Minto Hadi:2012)

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang terdapat pada setiap negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya

menanggulangi permasalahan kemiskinan salah satunya melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Pelatihan keterampilan dasar adalah salah satu program berbasis pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sebagai bekal usaha bekerja dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses implementasi program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pelatihan keterampilan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kecamatan Tambaksari pada dasarnya dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan hidup masyarakat keluarga miskin. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut kurang mendapatkan apresiasi yang baik dari para penerima manfaat sehingga realisasi dari capaian program tersebut kurang mendapatkan hasil yang optimal.

Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar di Kecamatan Tambaksari terdiri dari 4 jenis utama pelatihan yaitu pelatihan makanan, *handycraft*, menjahit, dan aneka usaha dengan 9 sub pelatihan yang dilaksanakan. Dalam mekanisme pelaksanaannya yang terdiri dari beberapa tahapan dari persiapan hingga evaluasi telah dilakukan secara baik dan dapat memberikan peningkatan keterampilan dan penghasilan dari beberapa kelompok keluarga miskin di Kecamatan Tambaksari. Namun peningkatan

keterampilan dan penghasilan bagi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan ini masih belum mencakup seluruh tujuan target dan sasaran awal.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pemberian ADD merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. ADD dapat dijadikan stimulan untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan, untuk itu masyarakat perlu diyakinkan akan pentingnya, tingkat keberhasilan, dan besar nilai tambahnya bagi masyarakat atas program/kegiatan yang difokuskan tersebut. Pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa.

Secara lebih detail penelitian terdahulu penulis sajikan dalam matriks berikut ini:

Tabel 2.1 Matrik Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Teori yang digunakan	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Pembeda
1	Oni Nugrianti dan Zulkarnaini (2013)	Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa melalui ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.	Pemberdayaan Masyarakat Menurut Lowe: Pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (<i>survive</i>)	Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode wawancara serta dokumentasi	Pemberdayaan masyarakat melalui program ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan lancar atau kurang efektif.	Peneliti ini lebih memfokuskan efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui ADD .
2	Ramandita Shalfiah (2013)	Mengetahui peran organisasi PKK dalam memberikan pemberdayaan pada masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Menurut Aritonang : Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan	Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan lapangan	Peran PKK sebagai fasilitator untuk masyarakat dalam penghubung dan penggerak belum optimal	Peneliti ini lebih memfokuskan pada peran organisasi PKK dalam pemberdayaan masyarakat
3	Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo (2012)	Untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor	Teori pemberdayaan menurut Wahjudin Sumpeno (2011) adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar	Penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif.	Bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional	Penelitian ini hanya fokus membahas bagaimana kesesuaian penggunaan ADD di Desa

		pendorong dan penghambat	tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.			
4	Trisakti Handayani, I Gde Parimarta, . Keppi Sukesi, I Wayan Ardika(2012)	mengkaji: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya PKK; (2) paradigma kelembagaan yang dikembangkan PKK;	Teori pemberdayaan yang dikembangkan PKK mengisyaratkan terjadinya perubahan organisasi menuju pada kemandirian, meskipun belum dilakukan secara optimal, karena kekuasaan tetap melakukan pengontrolan	Metode kualitatif yang digunakan meliputi: observasi partisipasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil lokasi di kota Malang. Subjek penelitian adalah PKK kota Malang, kecamatan Lowokwaru dan kelurahan Lowokwaru	paradigma pemberdayaan yang dikembangkan PKK mengisyaratkan terjadinya perubahan organisasi menuju pada kemandirian, meskipun belum dilakukan secara optimal,	Fokus penelitian ini mengkaji tentang PKK lebih dalam serta dalam menjalankan peran organisasi PKK

2. 2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan bisa dimaknai sebagai suatu proses menuju budaya atau proses untuk memperoleh daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. (Sulistiyani, 2004)

Berdasarkan pendapat Kindervatter mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupakan proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap pengembangan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat. (Anwar, 2007).

Lebih lanjut menurut Sumodiningrat (1999) mengungkapkan bahwa pemberdayaan bukan hanya meliputi pungutan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, sikap bertanggung jawab, pembaruan lembaga-lembaga sosial dan masyarakat didalamnya merupakan bagaian dari upaya pemberdayaan.

Individu yang lebih berdaya menampakan sikap-sikap: terbuka kepada perubahan, asertif, proaktif, bertanggung jawab, terarah, sensitif, suka belajar dari kesalahan, berani maju, kekinian, realistik, berpikir relatif, mencari alternatif, mengembangkan komitmen, menghargai dirinya, mengevaluasi orang, peka terhadap masyarakat, menyenangkan banyak orang, mengacu ke kehidupan selaras, serasi dan

seimbang. Hopson dan Scally juga mengungkapkan bahwa pemberdayaan diri dan kelompok dapat menjadi lebih berdaya dan mempelajari/pelatihan ketrampilan-keterampilan hidup (*life skills training*).

Lebih lanjut dalam hal pemberdayaan melalui pembelajaran pelatihan keterampilan-keterampilan hidup (*life skills*) menurut Nedler (1982) mengungkapkan bahwa pelatihan (*training*) adalah pembelajaran pengembangan individual bersifat mendesak karena adanya kebutuhan sekarang. Sedangkan dalam pandangan Procyon dan Thornton (1983) mengutarakan bahwa latihan keterampilan sebagai perbuatan sadar dalam menjanjikan berlangsungnya proses belajar dan pelatihan keterampilan mencakup kejadian-kejadian yang berurutan atau proses yang terus menerus dengan kekuatan-kekuatan dan batas-batas yang dapat ditentukan. Langkah-langkah pelatihan tersebut terdapat sembilan pelatihan diantaranya: 1) menentukan kebutuhan latihan, 2) metode pemberian instruksi, 3) menyiapkan program latihan kerja, 4) rancangan evaluasi latihan, 5) langkah-langkah sebelum pelatihan, 6) Instruksi, 7) langkah-langkah sesudah pelatihan, 8) umpan balik dari hasil latihan, dan 9) evaluasi manajemen.

Secara esensial, pemberdayaan menurut Kreisber memiliki dua ciri yaitu pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan kedua, pemberdayaan merupakan proses pelibatan dari individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi. Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengenal, memahami kebijakan dan memanfaatkan

kekuatan, menyelidiki proses-proses dimana masyarakat dapat mengatur atau menguasai (*to control over*) kehidupan, keterampilan dan kedudukannya menjadi partisipan kritis dan efektif dalam masyarakat, termasuk mengubah kekuatan itu.

Di dalam literatur pembangunan, konsep pemberdayaan bahkan memiliki perspektif yang lebih luas. Menurut Pearce dan Stiefel (1979) mengatakan bahwa menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan, peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Menurut pemikiran Paul pada tahun 1987 menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan pembagaaian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan”. Dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaanya secara berkelanjutan oleh (Borrini, dan Shantty 1991).

Sementara itu menurut, Hulme dan Turner pada tahun 1990 berargumen bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di area politik secara lokal maupun nasional. Maka dari itu pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuatan yang berubah antara individu mengambil tindakan atas nama diri sendiri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Persepsi diri bergerak dari korban (*victim*) ke pelaku (*agent*) karena

orang mampu bertindak dalam arena sosial politik dan berusaha memenuhi kepentingannya (*Shragge*).

Menurut pendapat Suhendra bahwa pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya. Selanjutnya pemberdayaan menurut Ife pada tahun 1995 adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung "*empowerment aims to increase the power of disadvantages* atau maksudnya ialah bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung" lebih jelasnya dari penjelasan Ife di atas (1995) bahwa Ife menyatakan: *Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to work the system and so on.*

Berdasarkan pengertian tersebut pemberdayaan merupakan suatu proses bantuan kepada masyarakat yang tidak beruntung dan lemah dalam mengembangkan setiap individu secara efektif dengan daya tarik lain dengan cara mempelajari dan menggunakan media, serta terlibat dalam aksi politis, dan memberikan pemahaman dalam pekerjaan sistem organisasi dalam rangka memberikan hak otonomi untuk melakukan kewenangannya untuk mewujudkan kemandirian kepada setiap individu sehingga kepercayaan yang sudah diberikan dapat mendorong mereka

dalam membangun kreatifitasnya supaya mereka bisa menyelesaikan pekerjaanya dengan baik. (Ife,1995) sementara itu menurut Ife tahun 1995 pada pandangan lainnya yaitu pemberdayaan merupakan:

1. Struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif.
2. Pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu '*rule of the game*' tertentu.
3. Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.
4. Post-Strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektifitas dalam pemahamn realitas sosial. (Konsepsi Pemberdayaan masyarakat-bahan kuliah PPS SP ITB)

Menurut Robinson dalam Kartasamita menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.

Rapport (1984) mengemukakan pemberdayaan merupakan suatu cara yang mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan supaya mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Konsep pemberdayaan menurut Swift dan Levin (1987) menuju pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktural sosial.

Pendapat Parsons, dkk pada tahun (1994) mengenai pemberdayaan yang merupakan sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan

menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Agus Purbathin Hadi, vol.1 no.1)

Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, bisa diterapkan dalam berbagai pendekatan. Salah satunya diantaranya yaitu konsep pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat bukan hal yang sama sekali baru, namun sebagai strategi dalam pembangunan relatif belum terlalu lama dibicarakan. Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu yang lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat merupakan suatu upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan tersebut untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap masyarakat kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasmita, 1997).

Selanjutnya konsep pemberdayaan menurut Prijiono dan Pranarka (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu pembagaaian kekuasaan kepada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil bangunan. Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi atau pengembangan diri berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan individu, dikemukakan oleh Glickman (1989) sebagai "*internal control and individually divergent practices, solving problems independently*" maksudnya ialah

bahwa pengendalian internal dan praktek-praktek yang berbeda secara individu serta menyelesaikan masalah secara mandiri. Akan tetapi, proses ini tidak hanya meliputi pemberdayaan individu saja, melainkan juga mencakup upaya memberdayakan orang lain, seperti yang dikemukakan oleh Weissglass (1990),” *a process of supporting to construct new meanings and exercise their freedom to choose*, yang bisa dijelaskan bahwa dalam hal ini satu proses pendukung untuk membangun suatu yang berarti dan memberikan latihan kebebasan untuk mereka dalam memilih. Pendapat ini diperkuat oleh Irwin (1995) yang menyatakan bahwa “*empowerment other people means giving them a chance to make their special contribution...your contribution may be a particular insight, a particular talent, a particular loving way to be with people* yang maksudnya memberdayakan orang lain berarti memberikan suatu kesempatan kepada mereka untuk membuat suatu kontribusi khusus.

Kontribusi tersebut mungkin satu pandangan tertentu berdasarkan bakat tertentu, kapabilitas mereka dan memberikan kasih sayang melalui orang-orang tersebut. (1981) menggabungkan dan memperluas kedua pendekatan ini dengan menyatakan “*empowerment is an interactive and highly subjective relationship of individuals and their environment, it demand innovation in qualitative / ethnographic methodology and special strategy to capture the intense experience of human struggle and transformation*”. Dengan maksud bahwa pemberdayaan adalah suatu interaktif yang mempunyai hubungan sangat tinggi dengan individu dan di lingkungan.

2.2.1.1 Tahapan atau Proses Pemberdayaan

Dalam hal pemberdayaan masyarakat memerlukan suatu upaya-upaya berkelanjutan dalam melaksanakan tahapan-tahapan atau proses-proses pemberdayaan yang membutuhkan keseriusan dan pengorbanan yang panjang diantaranya harus ada tahap-tahap dalam melaksanakan proses dimana proses akan menghasilkan pemberdayaan bagi masyarakat yaitu:

Menurut Randy dan Riant (2007) sebagai proses, pemberdayaan memiliki tiga tahapan diantaranya yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

1. Tahap penyadaran

Pada tahap ini, sasaran yang akan diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. Apabila yang menjadi sasaran pemberdayaan tersebut ialah para kelompok miskin, maka kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka bisa menjadi kaum menengah keatas bila mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari keskinannya. Tahap penyadaran ini bisa dilaksanakan dengan memberikan bersifat kognisi, *belief* dan *healing*. Dengan demikian sasaran memahami bahwa mereka butuh diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka.

2. Tahap pengkapasitasan

Pada tahap ini bahwa pengkapasitasan (*capacity building*) bisa juga disebut sebagai memampukan atau *enabling*. Hal ini sasaran harus mampu lebih dulu sebelum yang diberi sangkutan diberi daya atau kuasa. Jadi, pada prinsipnya sasaran agar diberikan lebih dahulu program perempuan untuk memuat sasaran mempunyai

keahlian atau ketrampilan (*skillfull*) atau mampu dalam mengelola sesuatu yang akan menjadi sasarannya dalam menerima daya atau kuasa. proses memapukan sasaran sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu: *workshop*, seminar, simulasi, dan lainnya. Pada hakekatnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia supaya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Pengkapasitasan organisasi bisa dilaksanakan dalam bentuk memperbaiki struktur organisasi yang akan menerima daya. Pengkapasitasan sistem nilai dilaksanakan setelah manusia wadahnya dimampukan atau dikapitasikan. Sistem nilai merupakan aturan main atau *rule of the game*. Pada level organisasi, sistem nilai seharusnya tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sistem dan prosedur, peraturan organisasi, dan sejenisnya. Pada level yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika, dan *good governance*. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu sasaran dan membuat aturan main (*rule of the game*) di antara mereka sendiri.

3. Tahap Pendayaan

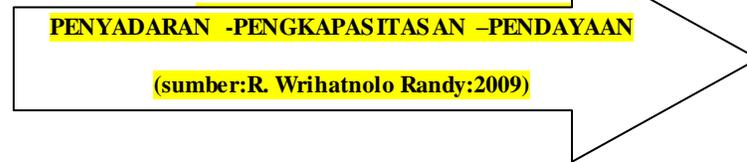
Pada tahap pendayaan dilakukan dengan cara pemberian daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang atau kesempatan kepada sasaran. Pemberian ini harus disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki sasaran. Pada hakekatnya proses pemberian daya atau kekuasaan harus disesuaikan dengan kecakapan penerima.

Berdasarkan penelitian kepustakaan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan pertama atau disebut dengan kecenderungan primer

dari makna pemberdayaan yang merupakan suatu proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan individu menjadi lebih berdaya. Proses ini bisa dilengkapi pula dengan berbagai upaya dengan membangun asset material yang berguna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi (Oakley dan Marsden 1984). Kecenderungan kedua disebut kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik eksterm) seolah bersebrangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu oleh Gunawan (2002). (Sripeni, Rusbiyanti, 2008)

Dalam tahapan proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan dan kekuasaan atau kemampuan membentuk masyarakat supaya individu lebih berdaya. Kecenderungan yang pertama itu merupakan bisa disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kecenderungan yang kedua atau disebut kecenderungan sekunder yang menekankan pada sebuah proses menstimulasi dan mendorong atau memberikan motivasi terhadap individu supaya memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

gambar 2.1 tahap pemberdayaan



Dalam proses pemberdayaan bisa melibatkan dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang meletakkan kepedulian untuk mendorong pemberdayaan. Secara lazimnya, proses tersebut merupakan perubahan yang bertahap konsisten dan secara berkelanjutan.

Proses pemberdayaan menurut pendapat Kartasmita (1995) mengemukakan bahwa dalam memberdayakan masyarakat miskin harus dilaksanakan melalui tiga (3) jalur:

1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat mempunyai potensi (daya yang dapat dikembangkan, pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya tersebut dengan mendorong dan memberikan motivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya sekaligus berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowerment*) dalam rangkatersebut diperlukan langkah-langkah positif dan nyata. Penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang (*opportunities*)
3. Memberdayakan telah mengandung makna melindungi (*protecting*) dalam hal memberdayakan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah dan menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. Secara khusus, perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembangunan ekonomi rakyat, yakni ekonomi usaha kecil termasuk koperasi agar tidak makin tinggal jauh, dan justru bisa memanfaatkan momentum globalisasi untuk pertumbuhannya.

Menurut Kindervatter (1979) bahwa proses pemberdayaan bisa dilaksanakan melalui program pendidikan luar sekolah yang dilakukan dalam delapan langkah yaitu: 1) menyusun kelompok kecil sebagai penerima awal atas program pemberdayaan, 2) mengidentifikasi/membangun kelompok warga belajar tingkat wilayah, 3) memilih dan melatih fasilitator kelompok, 4) mengaktifkan kelompok belajar, 5) menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, 6) mendukung aktivitas kelompok yang sedang berjalan. 7) mengembangkan hubungan diantara kelompok, 8) menyelenggarakan loka karya untuk evaluasi.

Proses pemberdayaan perempuan melalui program pendidikan luar sekolah pada dasarnya harus diawali dengan penyadaran masyarakat sasaran. Langkah penyadaran dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan tujuan belajar atau tujuan hidup. Proses pemberdayaan tanpa diawali dengan penyadaran kelompok sasaran, maka kemungkinan akan menghadapi hambatan baik oleh masyarakat maupun oleh sumber belajar atau agen perubahan.

Proses pemberdayaan pada dasarnya memiliki empat karakteristik diantaranya ialah: 1) organisasi sosial masyarakat, 2) manajemen dan kolaborasi pekerja, 3) pendekatan partisipasi dalam pendidikan orang dewasa, riset dan pembangunan pedesaan dan 4) pendidikan terutama ditujukan untuk melawean kejanggalan dan ketidak-adilan yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu.

2.2.1.2 Indikator Keberdayaan.

Dalam hal ini indikator berfungsi untuk mengatur apakah pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak, maka dari itu perlu ada indikator. Tinggal saja membandingkan kriteria normatif dengan kenyataan yang ada. Jika kesenjangan kecil pemberdayaan masyarakat relatif berhasil, sebaliknya apabila kesenjangan besar maka pemberdayaan masyarakat tidak berjalan. Melengkapi konsep pemberdayaan masyarakat dengan adanya indikator-indikatornya sebagaimana dijabarkan panjang lebar pada ciri-ciri tujuan tersebut. Maka adapun indikator masyarakat yang berdaya diantaranya:

1. Memiliki potensi dalam menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat,
2. Dapat berjalannya proses “*Bottom up planning*”.
3. Kapabilitas dan kreativitas ekonomi.
4. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga.
5. Kemampuan dalam menyampaikan argumen dan aspirasi tanpa adanya tekanan. (Hikmat, H, 2004.)

Menurut pendapat Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan dalam Girvan (2004) diantaranya ialah:

1. Kebebasan mobilitas, merupakan suatu kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, rumah ibadah dan rumah tetangga. Dalam hal ini tingkat mobilitas ini dianggap tinggi apabila individu mampu pergi sendiri.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari seperti beras. Minyak tanah, minyak goreng, bumbu dan kebutuhan dirinya seperti sabun mandi, bedak, sampo. Dalam hal ini individu dianggap mampu melakukan kegiatan tersebut, terutama apabila mereka bisa membuat keputusan sendiri tanpa

meminta ijin pasangannya dan terlebih apabila mereka dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

3. Kemampuan membeli komoditas besar ialah suatu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, apabila indikator di atas poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya dan terlebih apabila mereka dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, contohnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditanak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga yaitu informan ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan, dari mereka tanpa ijinnya yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah
6. Kesadaran hukum dan politik yaitu mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan diantaranya seorang DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yakni seseorang dianggap berdaya jika mereka pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil dan penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga yaitu memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi apabila mereka memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Dalam kategori program, indikator pemberdayaan Viqqie 2011 hal ini ada

lima kelompok besar diantaranya yaitu:

1. Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber daya seperti modal, informasi, kesempatan, berusaha dan memperoleh kemudahan atau fasilitas dan sebagainya.
2. Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang mempunyai keunggulan dan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan.
3. Pengembangan stimulus untuk membangkitkan swadaya dan swakelola dalam bidang pelayanan umum. lam mengukur pelaksanaan program-program

4. Pengembangan potensi masyarakat yang baik dalam pengertian SDM maupun kelembagaan masyarakat.
5. Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan, perencanaan-perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut Sumodiningrat (1999) mengatakan bahwa indikator keberhasilan yang digunakan dalam mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa hal diantaranya: 1) berkurangnya jumlah penduduk, 2) berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, 3) meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya, 4) meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, 5) meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan.

2.2.2.3 Pemberdayaan Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – KBBI, perempuan adalah jenis kelamin, yakni orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui, kata perempuan dapat digunakan untuk segala usia (perempuan kecil, perempuan dewasa atau perempuan tua).

Sedangkan perempuan, berasal dari kata “empu” yang berarti tuan, orang yang mahir, berkuasa, hulu, atau yang paling besar. Kata perempuan berhubungan dengan “ampu sokong”, yakni memerintah, penyangga, penjaga keselamatan, bahkan wali. Perempuan seakar juga dengan kata Puan, yang merupakan sapaan

hormat kaum hawa. Merupakan pasangan kata Tuan bagi laki-laki. Oleh karena itu perempuan sejajar dengan laki-laki. Bahkan lebih tinggi karena “empu”nya.

Dalam kesusastraan melayu klasik kita mengenal kata EMPUAN yang juga berarti "perempuan" yakni sebutan bagi istri raja. Mungkin dari situlah muncul kata perempuan yang lebih kurang berarti "orang yang dimuliakan atau yang dihormati".

Kebijakan pemberdayaan perempuan memang menjadi sebuah fenomena yang signifikan dan perlu dikaji lebih lanjut sehingga dalam penelitian ini sangat memfokuskan pada pemberdayaan perempuan itu sendiri dapat ditinjau melalui berbagai penjelasan secara rinci sebagai berikut:

Berdasarkan pendapat Karl (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembentukan keputusan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Menurut argumen Vargas pada tahun 1991 mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan menyangkut perolehan suara, mobilitas, dan penampilan di depan umum. Meskipun perempuan mampu memberdayakan dirinya melalui pengawasan "struktur kekuasaan" atau bahkan mengubahnya. Send an Grown (1987) menyatakan bahwa

pemberdayaan sebagai alat perempuan untuk mencapai tujuan (*a mens to an end*) dan menurut mereka organisasi mereka serta mengkristalkan visi dan prespektif yang mampu mengubah keadaan mereka saat ini dalam mengembangkan kemauan politik bagin suatu perubahan besar sangat diperlukan di dalam masyarakat. untuk itu,

organisasi dituntut agar memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan-perubahan tersebut.

Menurut pendapat Haryono Suyono (1998) mengilustrasikan dalam pemberdayaan perempuan seperti penjelasan berikut ini:

“Pemberdayaan dan pengembangan manusia, khususnya dengan prioritas perempuan, anak-anak dan remaja adalah suatu proses perempuan, anak-anak dan remaja adalah suatu proses yang memungkinkan setiap individu mampu memenuhi pilihannya dengan bijaksana karena sebagai manusia yang bermutu bisa berfungsi dan mempunyai kemampuan yang lebih baik karena itu pemberdayaan dan pengembangan manusia harus diterjemahkan sebagai upaya memperbaiki fungsi dan kemampuan antar individu untuk bisa hidup lebih lama, lebih sehat, lebih sejahtera dan terhormat.

Sedangkan menurut argumen Moser (1997), inti dari strategi pemberdayaan (*empowerment*) sebenarnya bukan bertujuan menciptakan perempuan yang lebih unggul dari pada laki-laki, namun pendekatan pemberdayaan ini kendati menyadari pentingnya kekuasaan perempuan, tetapi pendekatan tersebut lebih berupaya untuk mengidentifikasi pada kekuasaan perempuan bukan sekedar dalam kerangka dominasi yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Memang dalam upaya memberdayakan perempuan yang diperjuangkan adalah dipenuhinya hak perempuan untuk menentukan pilihan dalam kehidupan dan untuk mempengaruhi arah perubahan melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya material dan non

material yang penting. Dalam pendekatan pemberdayaan ini tidak menekankan pentingnya peningkatan status perempuan secara relatif terhadap kaum lelaki, namun berupaya memberikan kekuasaan pada perempuan melalui pendistribusian kembali kekuasaan di dalam dan di antara masyarakat. (Onny S. Prijono, 1996, hlm:63)

Menurut Agustin Satyawati pemberdayaan perempuan seharusnya tidak dimaksudkan untuk memaksa perempuan seharusnya tidak dimaksudkan untuk memaksa perempuan dengan laki-laki dalam sektor publik untuk mencapai posisi yang sejajar, tetapi seharusnya dilakukan untuk mendorong perempuan (dan juga laki-laki) menciptakan kerja sama dan sinergi antara perempuan dan laki-laki menciptakan kerja sama dan sinergi antara perempuan dan laki-laki baik dalam sektor domestik maupun masyarakat yang aman dan nyaman. Pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki adalah kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dan mengisi di semua bidang kehidupan. Dalam proses pemberdayaan ini perlu diperhatikan bahwa perempuan tidak bermaksud mendominasi atau merebut kekuasaan dan menggunakannya dengan cara eksploitasi dan over-aktif, tetapi dalam arti pengembangan diri cara-cara demokratis dalam membagi kekuasaan atas dasar kebersamaan kesetaraan dan tanggung rasa (*sharing power on a mutual and equal basis*).

Menurut Rifai (1996) dalam penelitiannya pemberdayaan perempuan merupakan memberikan kemampuan memotivasi perempuan dalam menunjukan

wujud sosok perempuan aktor transformasi dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga yang ditopang oleh tiga wujud penampilan mereka, yaitu sebagai dirinya (*self*), ibu rumah tangga, dan sebagai kader PKK. Penampilan mereka berakar kuat pada nilai sosial, ekonomi, pengetahuan dan keterampilan. Para perempuan aktor transformasi ini berkemampuan untuk mengubah, membelajarkan orang lain yang tidak mau menjadi mau, yang tidak suka menjadi suka, sehingga orang-orang yang dibinanya menjadi orang-orang yang bersedia dan mampu mengembangkan dirinya sendiri. Aktor transformasi ini adalah sosok pribadi yang mampu menghadirkan suatu situasi belajar bagi dirinya sendiri, bagi anggota keluarganya dan orang-orang dilingkungannya yang menjadi binaanya.

Pendapat Kalyanamita mendefinisikan pemberdayaan perempuan adalah penguatan perempuan dalam berbagai kehidupan sosial, ekonomi dan politik berdasarkan pada keterkaitan antara kebebasan pribadi dan aturan masyarakat.

Teori feminis Rosemerie (1989) dalam Achmad pada tahun 1994, bahwa ingin mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai manusia yang mempunyai tujuan akhir bagi perempuan untuk menjadi mandiri dengan cara menciptakan yang baru bagi perempuan, serta mereformasi yang tidak lurus bagi perempuan.

Menerurut Aritonang dalam Ihromi (2007) pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya dalam peningkatan kemampuan perempuan adalah suatu upaya dalam peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterrampilannya untuk meraih akses dan penguasaan, antara lain yaitu posisi pengambil keputusan, sumber-sumber dan struktur atau jalur yang menunjang.

Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan membekali perempuan dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan, pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan perempuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagaian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal.

Berdasarkan pernyataan Friedman (1992) dalam Pranarka (1996) merupakan bahwa yang terpenting diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga misalnya dengan cara mengatasi permasalahan untuk mendapatkan air dan bahan bakar, fasilitas penitipan bayi dan seterusnya.
2. Memperbaiki pelayanan kesehatan, termasuk penerangan keluarga dan mempunyai akses-akses atas pelayanan dan penggunaan peralatan secara mudah.
3. Menguasai pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas wanita.
4. Memperluas kesempatan dalam meningkatkan pendapatan yang berasal dari hasil bumi, peternakan, atau usaha-usaha lain yang menjamin perempuan dapat mengontrol atau mengendalikan pendapatannya sendiri.

Menurut pendapat Appeal (1999) dalam pemberdayaan perempuan ada enam jenis program pendidikan berkelanjutan yang dapat memberdayakan perempuan, yaitu 1) program pasca-leaksaraan, 2) program pendidikan kesetaraan, 3) program peningkatan pendapatan, 4) program peningkatan mutu hidup 5) program

pengembangan minat individu, 6) program yang berorientasi masa depan seperti hal berikut ini:

1. Dalam hal ini supaya masyarakat bisa menerima bahwa perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan serta berperan dalam pembangunan serta menikmati hasil pembangunan.
2. Dalam hal ini juga supaya bisa mengakses dan penguasaan yang sama terhadap sumber dan manfaat pembangunan.
3. Orang tua, laki-laki dan perempuan memikul beban kerja dalam rumah tangga dan masyarakat secara seimbang.
4. Adanya peningkatan kedudukan dan peranan perempuan yang mendukung peranan kodrati perempuan.

Secara prinsip telah dikemukakan oleh Keppi Sukei bahwa konsep pemberdayaan perempuan mencakup tiga hal diantaranya: 1) *Capacity building*, merupakan upaya membangun kemampuan perempuan, 2) *Culter change*, merupakan perubahan-perubahan budaya memihak perempuan, 3) *Structural adjusmant*, merupakan penyesuaian terhadap structural yang juga memihak kepada kaum perempuan.

Menurut Binar (2000) dalam pemberdayaan perempuan sektor informal bisa dianalisis dengan 5 (lima) dimensi diantaranya ialah

1. Dimensi kesejahteraan, yaitu secara sederhana variabel tersebut bisa diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Sejauh mana kebutuhan tersebut dapat dinikmati dan tidak saja dinikmati oleh laki-laki tetapi juga oleh kaum perempuan.
2. Dimensi akses atas sumber daya merupakan variabel tersebut dipeketahui, dan mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan dan lainnya. Adanya kesenjangan dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya antara laki-laki dengan perempuan akan mengakibatkan terjadinya perbedaan produktifitas diantara mereka.
3. Dimensi penyadaran atau kesadaran kritis merupakan variabel tersebut diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya upaya penyadaran terhadap adanya kesenjangan gender yang disebabkan faktor sosial budaya yang sifatnya dapat

dirubah. Kesenjangan tersebut terjadi adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.

4. Dimensi partisipasi merupakan sebuah variabel untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partisipasi yang ditunjukkan oleh terwakili atau tidak tenaga kerja perempuan dalam wadah atau lembaga-lembaga yang terkesan elit. Upaya pemberdayaan diarahkan pada kegiatan pengorganisasian perempuan sehingga bisa berperan dalam proses pengambilan keputusan dan kepentingan mereka juga dapat terwakili.
5. Dimensi kontrol merupakan variabel ini mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan terhadap alokasi kekuasaan pada segala bidang kegiatan.

Selanjutnya menurut Ife (1997) untuk tujuan pemberdayaan perempuan itu sendiri adalah

1. Meningkatkan keterjangkauan (akses) perempuan kepada sumber dan manfaat pembangunan (modal, tanah, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan informasi)
2. Meningkatkan kesadaran perempuan mengenai diskriminasi gender, bahwa situasi perempuan dan perlakuan diskriminatif yang mereka terima bukanlah disebabkan oleh takdir ataupun karena kekurangan pada diri mereka sendiri, tetapi karena system sosial yang mendeksripsikan mereka.
3. Meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dalam keluarga masyarakat.
4. Meningkatkan penguasaan perempuan terhadap sumber dan manfaat pembangunan,.
5. Pembangunan perempuan bertujuan menjadikan perempuan mandiri dalam arti ekonomi, sosial budaya dan secara psikologi, program-program pembangunan disamping memenuhi kebutuhan gender praktis perempuan juga harus dapat memenuhi kebutuhan strategis.

Pemberdayaan perempuan dalam hal ini bisa diarahkan pada alokasi kekuasaan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sedangkan analisis gender yang dilakukan mengenai pemberdayaan perempuan dalam penelitian profil kedudukan dan peranan perempuan di Indonesia meliputi yaitu 1) analisis aktivitas, 2) manfaat, 3) akses, 4) kontrol, dan 5) dampak.

Maka dengan melakukan demikian pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dengan melakukan pembentukan kapasitas dan pendayaan terhadap perempuan agar memiliki kekuasaan sehingga terwujudnya kemandirian dan penguatan dalam diri perempuan tersebut.

2.2.1.4 Faktor Adanya Pemberdayaan Perempuan

Perempuan sebagai warga negara mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di segala bidang kehidupan bangsa dan segenap kegiatan pembangunan. Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan (*Women In Developmen-WID*), dan perempuan dan pembangunan (*Women And Developmen-WAD*) lebih ditujukan pada masalah menegejar ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan, asumsinya penyebab keterbelakangan perempuan adalah tida adanya pemberdayaan perempuan. (Fakih, 2003)

Kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender, serta meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Kepercayaan pada kemampuan dari sendiri adalah faktor adanya pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses kolektif, politik/sosial, tetapi juga harus berlangsung pada tingkat individual dan pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses, tetapi juga merupakan hasil bahwa perempuan menjadi manusia yang menjadi kemampuan mengontrol dan memberi arah pada kehidupan sendiri. (Ihromi, 2000)

2.2 Alokasi Dana Desa

Pemberian Alokasi Dana Desa atau yang disebut ADD adalah sebuah wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan system penyelenggaraan NKRI, menurut Dunn (2003) menyatakan bahwa ADD merupakan manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar Desa dalam memberikan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka harus ada konsistensi pemerintah dalam menjalankan desentralisasi keuangan.

Jikalau pemerintah Provinsi dan Kabupaten mendapatkan perimbangan dan dari pemerintah Pusat, seharusnya pemerintah Desa juga mendapatkan perimbangan dana dari pemerintah pusat, seharusnya pemerintah desa juga mendapatkan perlakuan yang sama. Berdasarkan kutipan dari peraturan menteri dalam negeri

nomor 37 tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagaian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Sedangkan berdasarkan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dikelola oleh desa dimana alokasi dana desa salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan ADD tersebut juga diterapkan pengawasan secara langsung dari masyarakat untuk menekankan terjadinya penyimpangan supaya tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya partisipasi tersebut dari semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin dan lain-lain dapat tercapai (Sahdan;2007). Pengawasan tersebut terhadap kegiatan yang didanai ADD ini dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. sehingga dana tersebut bisa dikelola dengan baik, kelembagaan desa yang kuat bisa menjamin keberlanjutan ADD dan program yang dibiayai ADD dapat melibatkan perangkat desa dan masyarakat desa secara keseluruhan. Lembaga pengelola ADD terdiri dari tim yang memfasilitasi ditingkat Kabupaten/Kota. Tim untuk pendampingan ditingkat kecamatan dan tim pelaksana ditingkat desa. Prinsip-prinsip dasar dalam mengelola ADD adalah partisipatif, terbuka, bertanggung jawab

serta memperhatikan kesejahteraan oleh sebab itu supaya pelaksana ADD dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa (Sahdan;2007)

Adanya alokasi dana desa (ADD) ini selain memberikan manfaat untuk desa juga memberikan manfaat tersendiri bagi kabupaten/kota antara lain:

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota.
2. Kabupaten/Kota dapat lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang oleh tim FPPDP tahun 2005.

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang besarnya telah tertuang dalam peraturan desa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Hal ini pula kepala desa mempunyai peran sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan ADD sehingga aktivitas dalam pembiayaan dengan uang ADD ini harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Mengenai pembahasan alokasi dana tersebut, menurut pandangan Sidik (2002) bahwa sebenarnya konsep alokasi dana desa tersebut bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesain transfer keuangan pusat dengan daerah, orde baru ternyata masih melanjutkan pola yang digunakan orde lama. Beragam jenis transfer keuangan kepada desa tersebut

diantaranya adalah bantuan desa (Bandes), dana pembangunan desa (Bangdes), serta inpres desa tertinggal (IDT) dan kemudiu muncul regulasi terbaru terkait dengan ADD yaitu surat edaran menteri dalam negeri nomor 140/640/SJ tahun 2005 tanggal 22 maret 2005 tentang pedoman alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa..

Dalam hal alokasi dana desa tersebut bahwa secara keseluruhan kebijakan disamping ADD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun juga bisa mendukung jalannya demokrasi desa dan sekaligus memperkuat otonomi masyarakat dalam pengadaan pemerintahan dan pembangunan desa. Maka dengan kemunculannya ADD tersebut pemerintah desa akhirnya diminta untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pemerintah desa. Memang pada dasarnya kebijakan ADD tersebut telah dipogramkan oleh kabupaten atau kota untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat desa serta untuk memenuhi hak-hak deesa.

Dalam hal ini proses penyusunan ADD di Kabupaten atau Kota tersebut bisa ditinjau melalui beberapa yang berikut ini diantaranya (Viqqie Aulia, 2011):

1. Merumuskan gagasan atau memunculkan prakarsa atau inisiatif
2. Membentuk tim, penyusunan kebijakan ADD
3. Menjalankan proses penyusunan dan pendapatan kebijakan secara transparan dan partisipasi
4. Mensosialisasikan dan menjalankan kebijakan ADD secara baik dan akuntabel.
5. Dengan demikian alokasi dana desa bisa sangat membantu dalam hal pengembangan potensi sumber daya alam maupun sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa, seperti hal dalam penelitian ini alokasi dana desa akan sangat bermanfaat bagi pemberdayaan perempuan desa. Dan

dengan begitu alokasi dana desa dalam pemberdayaan perempuan melalui alokasi dana desa ini mempunyai makna bahwa bagaian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagaian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dalam mewujudkan pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.3 PKK

2.2.3.1 Pengertian PKK

Menurut Nunuk Murtiarti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Organisasi PKK diikuti oleh kaum perempuan.

PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Tim Penggerak PKK berada di tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan, PKK dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak PKK yang diketuai oleh isteri Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah), secara fungsional. Dapat dikemukakan bahwa kunci berkembangnya program dan kegiatan PKK, justru ada peran nyata diwujudkan oleh istri Pimpinan Daerah.

Strategi PKK dalam upaya menjangkau sebanyak mungkin keluarga, dilaksanakan melalui “Kelompok Dasawisma”, yaitu kelompok 10 – 20 KK yang berdekatan. Ketua Kelompok Dasawisma dipilih dari dan oleh anggota kelompok. Ketua Kelompok Dasawisma membina 10 rumah dan mempunyai tugas menyuluh, menggerakkan dan mencatat kondisi keluarga yang ada dalam kelompoknya, seperti adanya ibu hamil, ibu menyusui, balita, orang sakit, orang yang buta huruf dan sebagainya. Informasi dari semuanya ini harus disampaikan kepada kelompok PKK setingkat di atasnya, yang akhirnya sampai di Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.

Anggota Tim Penggerak PKK adalah para relawan, yang tidak menerima gaji, baik perempuan maupun laki-laki, yang menyediakan sebagian dari waktunya untuk PKK. Walaupun Sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumahtangga, perempuan, sebagai sosok sentral dalam keluarga. Ia tidak hanya mengurus soal kehidupan rumahtangganya dan mengasuh anak saja. Banyak diantara ibu rumahtangga yang membantu suami disawah, bahkan berusaha menambah pendapatan keluarga dengan berjualan.

Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Pembinaan teknis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait.

Peranan PKK dalam melaksanakan programnya mempunyai kebijakan, strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam upaya peningkatan kualitas

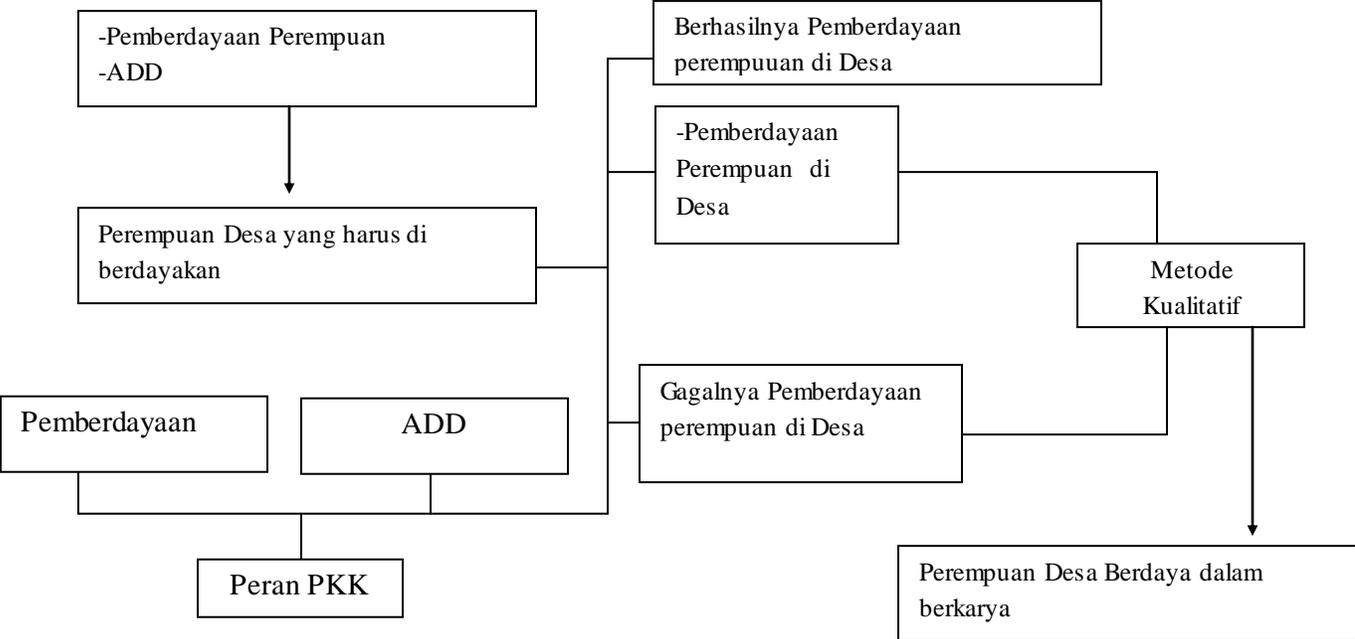
hidup dan kesejahteraan keluarga ada 10 program pokok PKK secara terpadu dilaksanakan oleh pokja – pokja dengan berpedoman pada 10 program pokok PKK.

1. Program POKJA I mengelola program penghayatan dan pengalaman pancasila dan program gotong royong.
2. Program POKJA II mengelola program pendidikan dan keterampilan pengembangan kehidupan berkoperasi.
3. Program POKJA III mengelola pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga.
4. Program POKJA IV mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

2.2.4 Alur Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Program pemberdayaan perempuan merupakan program Pemerintah desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di Desa untuk memberikan pelatihan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan perempuan Desa untuk berkeaktifitas dan menciptakan karya.

Gambar : Alur Kerangka Berfikir



Sumber: Alur Kerangka Berfikir Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha menungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta menurut Moleong (2007:31). Hasil penelitiannya ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki. Penelitian kualitatif yang diartikan mengeksplorasi pengalaman subjektif orang. Dan makna yang mereka hubungan dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Wawancara intensif, memungkinkan orang untuk berbicara bebas dan memberikan tafsiran terhadap suatu peristiwa sudut pandang merekalah yang paling penting.

Metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Sedangkan menurut Hadari (2007:33), penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yakni apa yang dinyatakan oleh informan penelitian mengenai pemberdayaan perempuan melalui alokasi dana Desa baik secara tertulis maupun lisan dipelajari dan diolah sebagai sesuatu yang utuh.

Untuk menentukan informan dalam lingkungan masyarakat khususnya perempuan tersebut yang pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan melalui Alokasi Dana Desa yang berpengaruh penting serta sekaligus pelaksana dalam program tersebut sehingga peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pemberdayaan perempuan melalui Alokasi Dana Desa.

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan karena Desa Sidodadi merupakan salah satu desa yang menerapkan pemberdayaan masyarakat perempuan melalui organisasi PKK.

3.3 Fokus Penelitian

Untuk mempertegas ruang lingkup dan fokus penelitian, maka peneliti memberikan fokus sebagai berikut:

3.3.1 Pemberdayaan merupakan untuk pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan dalam setiap organisasi, dalam hal ini pemberdayaan perempuan melalui alokasi dana desa melalui peran PKK.

3.3.2 Faktor pendukung dan penghambat dipahami sebagai kondisi yang memperkuat pemberdayaan perempuan dalam menunjang suatu karya.

3.4 Penentuan Informan

Sugiyono (2009: 221) mengemukakan bahwa penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka menguasai atau memahami kegiatan, yang dalam penelitian ini adalah kordinator PKK di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
2. Mereka yang terlibat kegiatan organisasi PKK di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
3. Mereka cukup waktu untuk diwawancarai.

Sasaran dalam penelitian “ Pembedayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa (Studi Tentang Peran PKK di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo) adalah meliputi pengurus organisasi PKK Desa Sidodadi; yaitu ketua (Ibu Tasrifah), Sekretaris (Ibu Ririn), Bendahara (Ibu Siti Kamilah), Kepala Desa (Karnoto), dan masyarakat anggota PKK Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong,2005). Berikut adalah daftar informan yang berhasil di wawancarai peneliti:

Tabel 4.2 Daftar Informan

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
Kepala Desa	1		Informan
Ketua PKK		1	Key Informan
Anggota PKK		4	Informan

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Data primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data menurut Sugiyono (2010: 156). Data-data primer ini berupa data-data dari *key* informan dan informan (Kepala Desa Sidodadi dan Ketua PKK) catatan hasil observasi dan hasil wawancara selama di lapangan.

3.5.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia, sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen menurut Sugiyono (2010:156). Dalam hal ini data-data yang diperoleh peneliti berupa buku tentang pembangunan dan arsip-arsip yang dimiliki oleh desa Sidodadi dalam program PKK.

3.6 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih

banyak pada observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono,2012:63).

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi merupakan salah satu metode untuk menyimpulkan data, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk menarik kesimpulan. Peneliti mencoba memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu pemberdayaan perempuan melalui alokasi dana Desa serta peran PKK di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan tersebut melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal. Beberapa hal yang terkait dengan pemberdayaan perempuan desa peneliti amati langsung.

2. Wawancara (*interview*)

Menurut Sugiyono wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu (Herdiyansyah, 2010:118). Dalam hal ini wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) pewawancara, 2) informan, 3) topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, 4) situasi wawancara.

Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. peneliti menggunakan wawancara untuk mencari informasi terkait proses pemberdayaan di desa Sidodadi, bagaimana pemberdayaan perempuan pada saat

PKK berlangsung, serta bagaimana dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam berkontribusi untuk sukses pemberdayaan perempuan tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut Louis Gottschalk (1986:38) dalam sarjanaku 2013, dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua, diperuntukan bagi surat-surat Negara seperti surat perjanjian, Undang-Undang hibah, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis tentang Desa Sidodadi.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa referensi dari jurnal-jurnal ilmiah hingga dokumen tentang Desa Sidodadi. Jurnal ilmiah digunakan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Referensi buku digunakan untuk mendeskripsikan teori yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan melalui alokasi dana Desa. Teori tersebut berguna untuk menganalisis temuan di lapangan. Selain jurnal ilmiah dan buku, dalam penelitian ini juga digunakan beberapa artikel dari internet maupun bulletin untuk mendukung dokumen yang ada.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digambarkan deskripsi tentang pemberdayaan perempuan melalui narasi yang menunjukkan permasalahan yang dibahas. Hasil wawancara juga disusun untuk mengetahui kategori tertentu, atau pokok permasalahan tertentu yang menunjuk pada permasalahan penelitian (Moleong dalam Sugiyono, 2000). Untuk selanjutnya dilakukan interpretasi deskriptif dengan mengacu pada landasan teoritik yang digunakan.

Dalam analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas bagaimana Alokasi Dana Desa dimanfaatkan dengan baik untuk pemberdayaan perempuan serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan berlangsung. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, mengelompokkan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (*data reduction*), kemudian data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (*data display*), dan setelah itu ditarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas (*conclusion drawing*) atau (*verification*). Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya dapat dilihat dari penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian (Moleong, 2000: 288). Menurut S. Nasution (1992: 129) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Naturalistik bahwa reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, sehingga data lebih mudah untuk dikendalikan. Sedangkan menurut Sugiyono (2008: 101) reduksi adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Proses reduksi data dimulai setelah melakukan wawancara dengan informan penelitian. Proses ini dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau

mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama (*domain*) yang sesuai dengan penelitian. Analisis *Domain* menurut Sugiyono (2008: 255) adalah proses untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh *domain* ini dengan cara melakukan pertanyaan *grand* dan *miniatour*. Dalam penelitian ini, pengelompokan data didapat dua tema utama yang sekaligus menjawab rumusan masalah. Yang pertama, tema tentang peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa. Yang kedua, tema tentang faktor pendukung dan penghambat kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan tema pendukungnya merupakan tema seputar pembangunan yang masih direncanakan maupun yang telah dilaksanakan karena fakta dilapangan dan teori sama untuk pemberdayaan perempuan di Desa Sidodadi tujuannya untuk memberdayakan masyarakat perempuan memiliki keterampilan.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang

sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Moleong (2000: 151) proses ini merupakan suatu proses untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat yang diperoleh dari lapangan.

3.6.2 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain (Soegiyono, 2008: 345).

BAB IV

PENGANALISASN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Desa Sidodadi merupakan salah satu bagaian dari wilayah Kecamatan Candi Kabupaten daerah tingkat II Sidorjo. Terletak ± 5 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten daerah tingkat II Sidoarjo atau ± 5 KM dari kantor Camat Candi dan berada ± 4 KM di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Desa Sidodadi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Suko/Banjar Bendo
2. Sebelah Timur : Desa Sepande
3. Sebelah Selatan : Desa Candi
4. Sebelah Barat : Desa Lebo

Dari batas wilayah diatas, Desa Sidodadi. Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah ± 99.750 H, berdasarkan Kecamatan dalam angka tahun 2014 Kecamatan Candi Desa Sidodadi berjumlah 2998 jiwa terdiri dari 1448 jiwa penduduk laki-laki dan 1550 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Sidodadi sebanyak 615 KK.

Gambar 4.1 Balai Desa Sidodadi

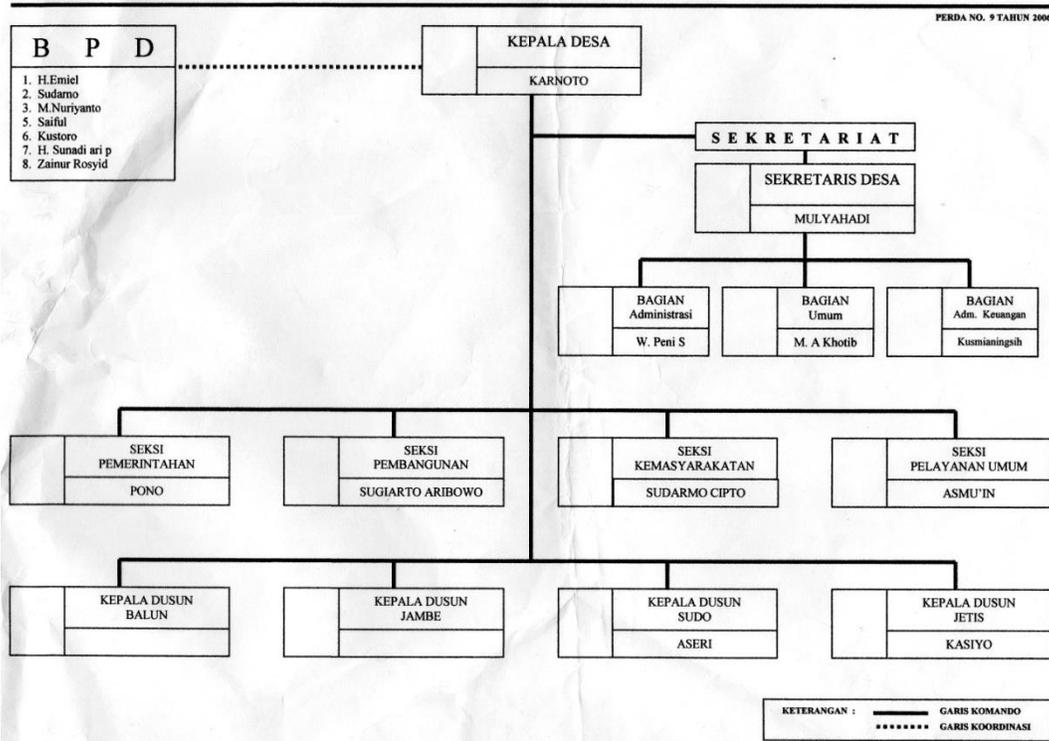


Sumber dokumentasi di lapangan tahun 2015

4.1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidodadi

Pemerintahan Desa Sidodadi masih memakai pola kepemimpinan Kepala Desa, yaitu pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh warganya. Selain itu juga terdapat Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang mempunyai hunungan koordinatif Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa. Dalam menjalankan pemerintahannya Kepala Desa Sidodadi dibantu oleh sekretaris Desa beserta staf-stafnya.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SIDODADI
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**



Sumber: Arsip Struktur organisasi Desa Sidodadi

4.1.2 Profil PKK Desa Sidodadi

Keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh perempuan. Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok. Salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga.

Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa adalah PKK. merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai

penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat.

Gerakan PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang bertujuan untuk dapat mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. PKK adalah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor/penggeraknya untuk membangun keluarga sejahtera sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat.

Pengertian ini secara lengkap telah termaktub dalam Buku Pintar PKK yang bunyinya sebagai berikut :

“PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera”.

Gerakan PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang mekanismenya dikelola dan dilaksanakan secara berjenjang, dari tingkat terbawah (Dawis, Banjar), Desa, hingga pusat. PKK menjadi gerakan untuk mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat.

PKK juga harus menembus pemahaman agama yang kurang tepat, tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi termasuk mereka harus memberikan penjelasan yang utuh tentang manfaat program KB kepada masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah, mereka membantu korban kekerasan perempuan dalam rumah

tangga dan masyarakat. PKK dalam membela kaum miskin yang kelaparan dengan cara membantu ekonomi kaum perempuan.

Satu hal penting untuk selalu mengusahakan peningkatan SDM kader, agar mengelola gerakan PKK dengan profesional, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku perencana, pelaksana dan pengendali, sebagai motivator dan penggerak, agar 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dapat terlaksana dengan lancar.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan. Oleh karena itu, sesuai amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, **Perda Kabupaten Sidoarjo No 19 tahun 2011 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan pasal lembaga 2 ayat 2 PKK adalah lembaga kemasyarakatan.**

Program kerja PKK berorientasi pada praksis, artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan membela kaum perempuan. Dan lebih dari itu, PKK mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa.

Jadi PKK adalah suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang

sejahtera. PKK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen non profit dan tidak berafiliasi kepada suatu partai politik tertentu.

PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan yang *pro poor, pro gender, dan pro job*, maka pemberdayaan PKK perlu terus ditingkatkan. Pemberdayaan PKK dalam keluarga meliputi segala upaya *Bimbingan, Pembinaan dan Pemberdayaan* agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri.

PKK juga merupakan gerakan masyarakat yang selama ini aktif berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan masyarakat. Keberhasilan Gerakan PKK ini juga tidak dapat dipungkiri dikarenakan sebagian besar pengurus dan kadernya adalah perempuan yang secara tradisional di masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar dalam melakukan UPAYA peningkatan dan mengembangkan kemampuan dan kepribadian dalam bidang ;

1. Mental spiritual, meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Fisik material, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Jika dicermati, kegiatan Gerakan PKK senantiasa menekankan prinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan keluarga. Jika kita sepakat, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menyediakan kebutuhan seluruh anggotanya, seperti pendidikan dan budi pekerti, kasih sayang, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya, sebagaimana dalam delapan fungsi keluarga. Artinya keluarga merupakan fundamental bagi pembangunan manusia, sekaligus barometer kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

4.1.2.1 VISI

Terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, berkesetaraan dan berkeadilan gender serta kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan.

4.1.2.2 MISI

1. Meningkatkan mental spiritual, menghayati dan mengamalkan Panca Sila dan Undang – Undang Dasar 1945, menegakkan pelaksanaan Hak

Azazi Manusia (HAM) Demokrasi, Kesetiakawanan Sosial dan gotong royong

2. Meningkatnya Pendidikan dan Ketrampilan keluarga, dalam upaya turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatnya pendapatan keluarga
3. Meningkatnya kualitas dan kwatintas pangan keluarga, dengan Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) ;
4. Meningkatnya derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, membiasakan hidup berencana dan menabung ;
5. Meningkatnya pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun program – programnya yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

4.1.2.3 SASARAN

Guna mewujudkan misi PKK tersebut, ditetapkan pula sasaran gerakan PKK:

1. Pengembangan dan peningkatan mental spiritual (sikap dan perilaku) sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat, dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Pengembangan dan peningkatan fisik material (pangan, sandang, papan kesehatan, dan kesempatan kerja) yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan.

Sasaran gerakan PKK adalah seluruh anggota keluarga yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya dalam bidang

mental spiritual, meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga Negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan Fisik material yang meliputi pangan, sandang ,papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan.

4.1.2.4 Struktur Organisasi Pkk Desa Sidodadi

1. Ketua : Tasrifah
2. Sekertaris : Ririn
3. Bendahara : Siti Kamilah
4. Ketua POKJA I :Sri Yani
5. Ketua POKJA II : Dwi Ani Umama
6. Ketua Pokja III : Musiyati
7. Ketua POKJA IV : Afiyu

4.2 Temuan Hasil Penelitian

4.2.1 Pemberdayaan Perempuan melalui Alokasi Dana Desa di Desa Sidodadi

Alokasi dana desa merupakan salah satu bantuan desa yang diberikan kepada desa yang digunakan dalam pengembangan desa diantaranya yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat termasuk sebagian kecil khususnya untuk pemberdayan perempuan desa. Menurut pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa alokasi dana desa

berasal dari APBD Kabupaten/Kota untuk desa paing sedikit 10% (sepuluh persen).

Sedangkan berdasarkan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2013 Pasal 57 Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada DPPKA Kabupaten Sidoarjo. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Kepala DPKKA melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan.

Menurut Pemerintah Daerah Alokasi dana desa (ADD) mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat..

Alokasi dana desa tersebut sudah sangat membantu bagi Desa terutama dalam pengembangan potensial Desa tersebut. Termasuk Desa Sidodadi sendiri sudah merasakan manfaat dari adanya lokasi dana desa tersebut. Dengan adanya pembangunan desa dan juga adanya kegiatan pemberdayaan-pemberdayaan

terutama pemberdayaan perempuan desa di desa Sidodadi. pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. Pada bidang pendidikan, penggunaan dana ADD untuk peningkatan pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan untuk operasional kegiatan belajar mengajar pada TK dan PAUD. Dalam pemanfaatannya sebenarnya sudah sesuai, namun terlalu kecilnya dialokasikan merupakan kelemahan dalam peningkatan kualitas pendidikan Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat.

Menanggapi pemberdayaan masyarakat tersebut, desa Sidodadi mengalokasikan dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat yaitu dengan peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. Dalam mendorong peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dari PKK, yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dengan kemandirian.

Tabel 4.1 program pemberdayaan masyarakat melalui dana ADD

NO	Program Pemberdayaan Desa Sidodadi	Per Tahun	Sumber Dana
1.	PKK	8.140.000	ADD
2	Balita	7000.000	ADD
3	Posyandu	8.140.000	ADD
4	Karang Taruna	1.500.000	ADD
5	Karang Werda	1.500.000	ADD

Sumber SPJ Desa Sidodadi tahun 2014

Dari hasil temuan berdasarkan data diatas metode wawancara yang dilakukan peneliti, berikut adalah diantara penuturan yang disampaikan Bapak Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo:

“ Dana ADD pada dasarnya untuk semua program pemberdayaan untuk masyarakat tetapi di desa kami ada beberapa pemberdayaan sehingga dana ADD kita pila-pila sehingga setiap program pemberdayaan memiliki dana masing-masing” (wawancara, 8 Mei 2015)

Senada dengan yang disampaikan Bapak Kepala Desa dalam pelaksanaan ADD untuk PKK Desa Sidodadi:

“ Untuk pemberian dana ADD PKK di Desa kami terbesar sama dengan POSYANDU karena organisasi PKK adalah satu-satunya di Desa kami organisasi pemberdayaan khususnya bagi perempuan sehingga ADD PKK kami alokasikan besar”(wawancara dengan Kepala Desa Sidodadi, 4 Mei 2015)

Hal senada pun disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sidodadi yang menuturkan:

“ADD sangat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat Desa Sidodadi terutama bagi PKK dalam melaksanakan POKJA yang di agendakan untuk masyarakat di Desa kami”(wawancara, 10 Mei 2015)

4.2.2 Pemberdayaan Perempuan di Desa Sidodadi

Pemberdayaan memiliki tiga tahapan diantaranya yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Dimana ketiga proses ini yang nanti akan membentuk perempuan berdaya dalam proses pembentukan pemberdayaan perempuan ada 3 (tiga) yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan yang

mana disampaikan oleh sekretaris Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten

Sidoarjo:

“Kami selalu melakukan sosialisasi pada masyarakat agar mereka sadar bahwa kita tinggal di Desa supaya tidak ketinggalan, untuk perempuan istri saya yang melakukan melalui PKK dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan mbak pada warga karena lebih efektif juga soalnya organisasi perempuan yang ada di desa kami ini hanya PKK mbak” (wawancara, 4 Mei 2015)

Hal senada pun disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa dalam pengkapasitasan (*capacity building*) bisa juga disebut sebagai memampukan untuk lebih berdaya pada masyarakat karena *skill* yang dimiliki masyarakat perempuan akan berkembang.

“Masyarakat perempuan di Desa kami ini ada dua golongan mbak antara yang tua dan muda kami pilih yang mudah biasanya kami beri segala pelatihan mbak karena semangatnya masih tinggi sedangkan yang tua kami fokuskan membrikan penyuluhan-penyuluhan tentang hidup sehat.” (wawancara, 4 Mei 2015)

Penuturan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa tentang Pendayaan dilakukan dengan cara pemberian daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang atau kesempatan kepada sasaran. Pemberian ini harus disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki pada tahap pendayaan ini akan mengetahui proses pemberdayaan perempuan berhasil atau tidak.

“ kami selalu mengadakan lomba di Desa walaupun bukan hari Nasional karena supaya masyarakat kami tidak hanya sebatas mendapatkan pelatihan-pelatihan tentunya supaya berkembang dengan adanya lomba, masyarakat tua dan muda senang jika lomba dan menang mereka akan percaya diri untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya dan semangat jika ada program-program pemberdayaan”(wawancara, 4 Mei 2015)

4.2.1.1 PKK Sebagai Organisasi Pemberdayaan Perempuan di Desa Sidodadi.

PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

PKK mampu melakukan upaya pemberdayaan keluarga meskipun pada kenyataannya kekuasaan tetap melakukan kontrol. Pada paradigma pendidikan dan pembinaan, kekuasaan secara langsung melakukan hegemoni, sementara pada paradigma pemberdayaan, muncul kesadaran dari kekuasaan untuk melakukan pemberdayaan meskipun kenyataannya hanya sebatas slogan, sehingga PKK tetap menjadi gerakan statis. Dekonstruksi atas kelembagaan PKK perlu dilakukan agar PKK dapat menjadi organisasi yang mandiri dan berdaya.

Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK dilakukan oleh 4 (empat) kelompok kerja (POKJA) secara koordinatif. Berikut wawancara dengan ketua tim penggerak PKK atau Ibu Kepala Desa:

“ PKK di Desa kami ini diadakan satu minggu sekali mbak, terkadang juga libur kalau kesepakatan libur diawal, PKK ini satu-satunya program pemberdayaan perempuan di Desa kami, kami melakukan pemberdayaan untuk masyarakat ini tentunya tidak lepas juga diarahkan oleh Bpk Kepala Desa beserta jajarannya apa yang harus kami khususnya saya pribadi dalam membina masyarakat Desa ini” ”(wawancara dengan ketua tim penggerak PKK Desa Sidodadi, 10 Mei 2015)

Senada yang disampaikan Ibu Sekertaris PKK mengenai PKK di Desa

Sidodadi berikut penuturan Bendahara PKK tentang organisasi PKK di Desa

Sidodadi:

“PKK di Desa kami ini sebenarnya mbak tujuan nya adalah pemberdayaan tetapi masyarakat di desa ini hanya cenderung dengan ikut arisan biasanya nanti setelah dapat arisan tidak masuk, lalu kami ketika ada program sosialisasi membuat edaran dulu masyarakat desa masih perlu di berikan pemberdayaan mbak agar sadar bukan hanya uang yang harus dipikirkan” (wawancara dengan ibu S 10 Mei 2015)

Berikut penuturan yang disampaikan oleh ”Ibu S” mengenai organisasi PKK di Desa Sidodadi

“ saya senang mbak ikut PKK siapa tahu nanti dapat arisan, lumayan mbak buat tambahan tabungan uangnya, nanti sewaktu-waktu ada keperluan bisa dipakai jadi bermanfaat uang arisan bisa membantu tambahan tabungan” (wawancara dengan ibu S 10 Mei 2015)

4.2.2.1.1 10 Program Pokok PKK

1. Penghayatan dan pengamalan pancasila
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
6. Pendidikan dan keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat

Penanggung Jawab Pelaksana Program

1. POKJA I:
 - a. Penghayatan dan pengamalan pancasila
 - b. Gotong royong.
2. POKJA II:
 - a. Pendidikan dan keterampilan
 - b. Pengembangan kehidupan berkoprasi

- 3. POKJA III:
 - a. Pangan
 - b. Sandang
 - c. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- 4. POKJA IV:
 - a. Kesehatan
 - b. Kelestarian Lingkungan Hidup
 - c. Perencanaan Sehat

Berikut adalah kerja lapangan dalam pemberdayaan perempuan di Desa

Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

POKJA I:

- 1. Pembinaan forum Komunikasi pekerja rumah tangga dengan kegiatan penyuluhan tentang etika, gama, hukum dan memberikan keterampilan memasak
- 2. Pembinaan lansia meliputi: pembinaan olahraga, kesehatan dan kesenian.
- 3. Gerakan peduli korban bencana alam: memberikan bantuan pada korban yang tertimpa musibah bencana alam

POKJA II:

- 1. Pelatihan Kader Posyandu terintegrasi dengan PAUD
- 2. Mengembangkan koperasi dengan menggalang kerjasama untuk menambah modal

POKJA III:

- 1. Mengadakan penyuluhan tentang kewaspadaan pangan
- 2. Mengadakan latihan penganekaragaman pangan yang bergizi
- 3. Mengadakan gerakan tanam pohon dan mengadakan lomba penghijauan ketika HUT RI
- 4. Meningkatkan sosialisasi tentang rumah sehat layak huni.

POKJA IV:

- 1. Revitalisasi Posyandu:
 - a. Pelatihan, penyegaran dan pembinaan kader secara berkesinambungan
 - b. Penyempurnaan system informasi Posyandu
 - c. Optimalisasi program PAUD
 - d. Mengembangkan Posyandu Lansia

2. Upaya perbaikan gizi keluarga melalui sosialisasi dan fasilitasi keluarga sadar gizi
3. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi tentang kebersihan lapangan dan diri pribadi, pengelolaan sampah rumah tangga, kebersihan perorangan, pengenalan bahaya penyakit sebagai dampak kurang bersihnya lingkungan

Berikut wawancara dengan ketua tim penggerak PKK atau Ibu Kepala Desa tentang POKJA PKK:

“POKJA kami ada 4 (empat) kami melaksanakan POKJA ini setiap bulan POKJA 1, lalu bulan berikutnya POKJA 2 dan seterusnya sampai POKJA 4 jika sudah terlaksana POKJA 1 sampai empat kami bilang ke Bapak Kepala Desa mbak lalu kami mengundang tamu baik dari orang kecamatan, kabupaten atau orang akademisi mbak untuk memberikan wawasan pada masyarakat biar ilmunya bertambah. (wawancara, 17 Mei 2015)

Sejalan dengan itu ketua tim penggerak PKK menjelaskan tentang anggaran untuk setiap POKJA PKK di Desa Sidodadi:

“untuk anggaran PKK POKJA dana nya dari ADD PKK, iuran kas teman-teman di PKK dan dana ADD untuk lansia, karangweda, POSYANDU karena terkadang program Desa diserahkan di PKK ikut andil’. (wawancara, 17 Mei 2015)

Adapun tanggapan masyarakat Ibu R tentang POKJA PKK di Desa Sidodadi:

“saya ikut PKK itu biar tidak jenuh mbak di rumah karena saa ibu rumah tangga, kalau disini saya bertemu dengan teman-teman, ikut PKK banyak manfaat nya juga contohnya saya ini sedang hamil di PKK ini ada senam hamil sabtu depan gratis dapat uang juga kan lumayan mbak saya tidak keluar uang” (wawancara, 17 Mei 2015)

Senadapun disampaikan salah satu masyarakat PKK Desa Sidodadi Ibu H tentang POKJA PKK:

“Program yang ada pada PKK ini banyak mbak tapi terkadang masyarakat kurang menyadari bahwa program itu membantu untuk dirinya sendiri, contohnya saja ketika Ibu mengadakan lingkungan sehat yang mau datang hanya tiga padahal itu juga dapat sugu mbak, tapi masyarakat di Desa kita

kurang menyadari bahwa program-program PKK itu sangat bermanfaat” (wawancara, 17 Mei 2015)

Senada penuturan masyarakat Ibu R program POKJA 1-1V di Desa

Sidodadi:

“selain program POKJA yang banyak dan hasilnya terkadang ada program yang tidak terlaksana bukan karena dana tetapi karena orang yang ikut PKK tidak datang sehingga terkadang yang mengurus POKJA pun sama”(wawancara, 17 Mei 2015)

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat

4.3.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD salah satunya adalah partisipasi masyarakat terutama organisasi PKK bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan dalam ADD cukup tinggi.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD pada desa Sidodai memberikan manfaat pemberdayaan perempuan bahwa pemberdayaan dapat berupa ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Berikut penuturan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa mengenai faktor pendukung pemberdayaan perempuan melalui alokasi dana desa dan peran PKK

“ faktor pendukung dana ADD selalu kami berikan setiap tahun, bahkan PKK kami anggarkan yang paling tinggi agar program-program

pemberdayaan dapat terlaksana tanpa kendala biaya lagi”(wawancara, 8 Mei 2015)

Senada dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Sekertaris Desa juga menyampaikan faktor pendukung:

“Pusat terus mendukung pemberdayaan karena setiap bulan selalu ada kegiatan baik pelatihan atau lomba sehingga kegiatan pemberdayaan khususnya di Desa bisa terus berkelanjutan”(wawancara, 8 Mei 2015)

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Ketua tim penggerak PKK Desa Sidodadi:

“pemerintah sangat mendukung organisasi PKK apalagi dengan program-program yang kita kaitkan dengan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat agar masyarakat kami tidak ketinggalan dengan masyarakat perempuan kota dengan adanya dana ADD dan bantuan iuran kita pribadi program pemberdayaan berjalan” (wawancara, 20 Mei 2015)

Senada yang disampaikan oleh Ketua tim penggerak PKK berikut penuturan anggota PKK Ibu K:

“Pemerintah sangat peduli banyak program-program pemberdayaan bagi wanita yang diadakan baik dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sehingga kami semangat untuk mengikutinya dan menambah ilmu”(wawancara, 20 Mei 2015)

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Ibu SY tentang faktor pendukung:

“Pemerintah Desa sangat mendukung mbak ketika ada lomba apapun yang berkaitan dengan program kami selalu untuk menyuruh kami semua untuk ikut kata Bapak Kepala Desa menang dank ala itu hal biasa yang penting harus ikut”(wawancara, 20 Mei 2015)

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Ibu K tentang faktor pendukung:

“Kita sering mengikuti lomba di tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi, biasanya kalau kita menang Pak Lurah sering menambah uang transport kita”(wawancara, 20 Mei 2015)

Adapun pendapat anggota PKK Ibu SY mengenai faktor pendukung sebagai berikut:

“Bu Lurah sangat aktif mbak dalam membina kita selalu memberiti tahu kita semua jika ada lomba-lomba ataupun pelatihan-pelatihan dari luar dan bu lurah selalu menuturkan pada kita untuk ikut semua”(wawancara, 20 Mei 2015)

4.3.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD pada desa Sidodadi yaitu rendahnya sumber daya manusia dalam pengkaderan PKK untuk pemberdayaan selanjutnya. Karena Program PKK belum dipahami dan tersosialisasi secara merata, masih belum meratanya sistem informasi manajemen PKK dengan sarana-sarana penunjangnya yang mempunyai kemampuan mengakses data informasi serta keterbatasan dana.

Dari tujuan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan Pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum berhasilnya pengelolaan ADD pada desa Sidodadi berdampak pada rendahnya pemberdayaan masyarakat pada organisasi PKK.

Berikut adalah wawancara dengan Ketua tim pnggerak PKK tentang faktor penghambat pemberdayaan perempuan melalui ADD dan peran PKK di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo:

“Masyarakat desa masih kurang berpartisipasi dalam menghidupkan program-program pemberdayaan yang di danai pemerintah hanya beberapa saja yang sadar bahwa penting nya menambah ilmu walaupun hanya Ibu rumah tangga, sehingga yang ikut PKK bisa dihitung mbak padahal masyarakat perempuan di Desa banyak”(wawancara, 20 Mei 2015)

Hal senadapun disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sidodadi tentang faktor penghambat yang terjadi di lapangan dalam berorganisasi:

“Masyarakat kami mengikuti PKK itu cenderung hanya ikut arisan sehingga ketika arisan nya sudah dapat mereka enggan masuk rutin lagi mengikuti PKK”(wawancara, 24 Mei 2015)

Berikut penuturan yang disampaikan anggota PKK oleh Ibu SY mengenai kendala-kendala di lapangan yang senada dengan penuturan Bapak Kepala Desa:

“kesadaran teman-teman masih kurang untuk mengikuti kegiatan PKK padahal tidak setiap hari ada PKK jadi yang bisa diajak maju hanya beberapa orang teman-teman”(wawancara, 20 Mei 2015)

Hal senadapun disampaikan oleh Ibu K yang juga sebagai anggota PKK menuturkan:

“kurang tau mbak kenapa teman-teman kurang semangatnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan padahal kegiatan itu sendiri buat dirinya sendiri sebenarnya sangat disayangkan sih mbak kesadaran mereka kurang”(wawancara, 20 Mei 2015)

Berikut juga penuturan Ibu H tentang faktor penghambat pemberdayaan masarakat yang dilakukan oleh PKK pada hari-hari dimana pran PKK melakukan pemberdayaan:

“ Bu Lurah sudah memberikan undangan setiap ada kegiatan arisan PKK atau ada kegiatan yang diadakan dari luar tapi teman-teman kurang semangat mengikuti kegiatan itu sampai Bu Lurah jemput ke rumah masing-masing tapi tetap saja yang mau ikut hanya beberapa: (wawancara, 20 Mei 2015)

Ibu R yang merupakan salah satu anggota PKK juga menyampaikan pendapat tentang faktor penghambat:

“di desa kami rata-rata yang ikut PKK itu Ibu-Ibu tidak ada anak bujang yang ikut sehingga sangat sulit untuk mengajak anak bujang ikut PKK saya pernah mengajak tetangga saya kebetulan dia bujang tetapi dia tidak mau ikut”(wawancara, 20 Mei 2015)

Sedangkan bendahara PKK menyampaikan pendapat yang diamati ketika pemberdayaan berlangsung adalah:

“ teman-teman kalau membayar iuran kas juga kurang kesadarannya sementara ketika dana ADD habis kita juga berhenti sebentar melaksanakan kegiatan-kegiatan hanya kegiatan arisan yang dilakukan(wawancara, 20 Mei 2015)

Senada dengan Bendahara PKK ibu SY juga menuturkan hal yang sama pendapat dengan Bendahara:

“ kalau sudah tidak ada dana kita hanya kegiatan arisan yang dilakukan soalnya uang kas hanya sedikit yang saya tahu teman-teman jarang yang membayar iuran kas sehingga hanya arisan yang berjalan”(wawancara, 20 Mei 2015)

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa di Desa Sidodadi

Berbicara pemberdayaan perempuan melalui ADD selama ini sudah terlaksana dengan maksimal di Desa Sidodadi, ADD di sini berperan untuk membantu program-program pemberdayaan perempuan di Desa Sidodadi ini terlaksana,

sehingga di harapkan dari pemerintah Desa pemberdayaan perempuan di Desa Sidodadi terus bertambah agar kaum perempuan memiliki wawasan yang luas serta harapan dari hasil pemberdayaan ini pribadi peneliti yang yang kontributif, produktif dan transformatif, sehingga nantinya pemerinta nanti akan menambah ADD untuk pembrdayaan.

Mengacu pada teori Karl mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses kesadaran pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembentukan keputusan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pada dasarnya pemberdayaan perempuan terjadi karena adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akan tetapi sampai saat ini upaya-upaya pemberdayaan perempuan focus pertama adalah menyamakan status antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan mengacu pada pendapat Haryono Suyono yang mengilustrasikan pemberdayaan perempuan yaitu pemberdayaan dan pengembangan manusia, khususnya dengan prioritas perempuan adalah suatu proses yang memungkinkan setiap individu mampu memenuhi pilihannya dengan bijaksana karena sebagai manusia yang bermutu dan berfungsi dan mempunyai kemampuan lebih baik.

Peneliti sebelumnya tentang pemberdayaan masyarakat melalui program alokasi dana yang dilakukan oleh Oni Nugrianti dan Zulkarnain pada tahun 2013 hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivita pemberdayaan masyarakat melalui program ADD di Kecamatan Kuantan Tengah masih belum berjalan dengan lancer atau kurang efektif, sedangkan faktor yang dominan adalah faktor ketakutan.

Peneliti sebelumnya yaitu tentang peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mendukung program-program pemerintah kota Bontang oleh Ramandita Shalfiah hasil penelitiannya adalah bahwa peran PKK sebagai fasilitator untuk masyarakat dalam penghubung dan penggerak.

Di lapangan program pemberdayaan perempuan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perempuan dengan lebih menekankan pada peningkatan potensi pendidikan pada diri serta ADD adalah fasilitas untuk menggunakan kegiatan untuk memberdayakan sehingga tercapai proses pemberdayaan perempuan. Dalam uraian hasil peneliti seama di lapangan, di temukan bahwa ADD merupakan anggaran dari pemerintah untuk sebagai anggaran pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri dalam Negeri Nmor 37 Tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan pada pasal 18 bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagaian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%. Dan pada pasal 22 di jelaskan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pasal 18 dan 22, maka pemerintah desa wajib melakukan pemberdayaan melalui ADD dan mengaggarkan 70% untuk pemberdayaan.

Peneliti juga melihat tentang peran PKK melakukan pemberdayaan perempuan dalam hal ini PKK turut andil besar dalam pemberdayaan masyarakat khususnya

perempuan sehingga dan ADD tetap pada pos-pos masing-masing pemberdayaan akan tetapi yang melaksanakan pemberdayaan tersebut anggota PKK akan tetapi bukan ADD PKK yakni ADD yang lain seperti POSYANDU, Karangweda, Lansia hanya saja yang berperan dalam pemberdayaan ini adalah anggota PKK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pemberdayaan perempuan melalui ADD di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah tersalurkan pada pos-pos pemberdayaan masing-masing hanya saja yang turut andil besar mensukseskan pemberdayaan perempuan di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah peran PKK yang lebih dominan sehingga dapat memaksimalkan pemberdayaan perempuan karena anggota PKK semua adalah kaum perempuan sehingga pemberdayaan perempuan melalui ADD dengan bantuan peran PKK sangat maksimal tercapai suatu pemberdayaan perempuan.

4.3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

4.3.2.1 Faktor Pendukung

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai faktor-faktor pendukung pemberdayaan perempuan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Bahwa program pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari peran PKK dan antara semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini, baik dari elemen pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dukungan Pemerintah:

Pemerintah sebagai penggagas program pemberdayaan melalui ADD sebagai bantuan dana kepada Desa untuk mengembangkan program pemberdayaan di Desa. Pemerintah Desa yang menjadi faktor penting dalam menyelenggarakan program ini. Pemerintah Desa sebagai instansi tertinggi di Desa berkewajiban memfasilitasi dan terlibat aktif dalam mengikuti pemberdayaan perempuan oleh PKK. karena kerjasama besinergi dan koordinatif dari pemerintah Desa dan PKK membantu suksesnya pemberdayaan perempuan melalui ADD.

2. Dukungan Masyarakat

Faktor dukungan dari masyarakat perempuan setempat memberikan sambutan baik dan respon positif adanya program pemberdayaan perempuan melalui ADD melalui PKK sebagai program pemerintah yang dapat mengoptimalkan pemberdayaan perempuan di Desa, karena masyarakat perempuan di Desa merupakan obyek sasaran bagi program ini.

3. Antusiasme dan partisipasi masyarakat.

Tanggapan dan antusiasme masyarakat dalam menyambut adanya program pemberdayaan perempuan melalui ADD . hal ini merupakan kondisi yang sangat bagus untuk menyelenggarakan pemberdayaan perempuan di Desa yang lebih baik.

4. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa akan menghasilkan respon positif terkait dengan penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan melalui ADD. hal ini tentu berdampak baik terhadap program-program pemberdayaan yang dijalankan di Desa

4.3.2.2 Faktor Penghambat

Berikut adalah pembahasan mengenai faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan perempuan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo:

1. Kurangnya koordinasi partisipasi masyarakat antara anggota PKK yang bersangkutan akan memberikan kader yang rendah, hal ini sangat berpengaruh terhadap adanya program yang sedang dijalankan kemudian hari. Kurangnya kerjasama partisipasi masyarakat perempuan desa yang tidak ikut PKK sehingga menganggap kegiatan yang berjalan sampai pada kepengurusan PKK saat ini. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Desa dalam membuat kade-kader selanjutnya di Desa Sidodadi
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam turut andil berpartisipasi dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah yang bertujuan untuk menyamakan tingkat gender antara perempuan dan laki-laki semakin minim. Hal ini tentunya pemerintah Desa memaksimalkan untuk ke depan merubah paradigm yang ada sekarang

3. Program pemberdayaan yang sangat banyak sehingga terkadang ADD habis sebelum program berjalan semua, sedangkan kesadaran masyarakat untuk iuran kerang enggan membayar sehingga ketika ADD habis program pemberdayaan perempuan berhenti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Bedasarkan temuan hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan:

- 5.1.1 Pemberdayaan perempuan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) adalah program pemberdayaan perempuan dimana dana pemberdayaan bersumber dari dana pemerintah, pemberdayaan perempuan di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo juga melibatkan peran PKK sehingga pemberdayaan perempuan di Desa Sidodadi peran yang paling dominan adalah peran PKK sebagai fasilitator pemberdayaan berlangsung.
- 5.1.2 Keberhasilan atau kegagalan program ditentukan oleh dua kondisi yang mempengaruhi, yaitu faktor pendukung dan penghambat, dalam hal ini faktor pendukung yang mendukung pemberdayaan perempuan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo: Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa serta peran PKK di Desa Sidodadi, dan partisipasi masyarakat Sehingga membentuk kerjasama yang baik antara pemerintah Desa dengan pihak-pihak terkait. Adapun faktor yang menghambat jalannya program pemberdayaan adalah; Dana ADD yang jumlahnya minim setiap tahunnya dari pemerintah serta tingkat kesadaran dan antusiasme

masyarakat yang rendah, terutama dalam pengkaderan PKK di Desa sehingga perlu upaya yang lebih mememberdayakan masyarakat agar sadar akan perlunya pemberdayaan.

5.2 Saran-saran

Dari temuan, pembahasan, dan kesimpulan yang telah ditemukan maka dapat diambil beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk mengatasi masalah pemberdayaan perempuan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo:

- 5.2.1 Perlu adanya kerjasama dalam pengkaderan PKK dalam generasi berikutnya serta penambahan dana ADD setiap tahunnya agar dapat diteruskan dan dikembangkan pemberdayaan perempuan melalui ADD tersebut.
- 5.2.2 Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terutama di organisasi PKK karena PKK adalah sentral utama melakukan pemberdayaan perempuan terutama penggalangan dana kas sehingga program pemberdayaan jika ADD habis bisa berlanjut

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, 2007, Manajemen Pemberdayaan Perempuan, Alfabeta, Bandung.
- Baratha, I Nyoman, 1982, Desa Masyarakat Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Bainar, dan Achi Malik (editor), 1999, Jagat Wanita: dalam pandangan para tokoh dunia, PT. Pustaka ides indo, Jakarta.
- De Vries, Dede William. 2006. Gender Bukan Tabu Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi, Center for international forestry research (CIFOR), Bogor.
- Friedman, John, 1992. Empowerment The Politics of Alternative Development, Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- Ife, J.W., 1995. Community Development Creating Community Alternatives vision, Analysis and Practice. Longman Melbourne.
- Kartasmita, Ginandjar, 1997, Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Metodenya di Indonesia, LP3ES, Jakarta
- Nedler, L. (1982). Designing Training Programs ; The Critical Events Model, London : Addison Wesley Publishing Company
- Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi , Center for Strategic and International Studies, Jakarta
- Parson, W, 1995. Public Policy, An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, Aldershot Edward Elgar Publishing United Kingdom
- Pearse, Andrew and Michael Stiefel, 1979, Inequality Into Participation: A Research Approach, Geneva, UNRISD.
- Procton J.H. dan Thornton, W.M. (diterjemahkan Mulyana Sugandi, (1983) latihan kerja, Bina Aksara
- Suhendra, 2006, Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, Alfabeta, CV, Bandung.

Sulistiyani, Ambar, Teguh, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gaya Media, Yogyakarta.

Soetomo, 2006, Straregi-Strategi Pembangunan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sukesi, Keppi, dkk, 2002, Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perempuan Sektor Informal, Pusat Penelitian Peran Wanita Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, Malang.

Sulistiyani,Ambar Teguh, 2004, Kemitraan dan model-model pemberdayaan, Gaya Media, Yogyakarta

Sumodiningrat, Gunawan, 1999, Pemberdayaan masyarakat dan jaringan pengaman, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widjaja, Haw, 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

MEDIA ONLINE

PERBUP Sidoarjo No 50 tahun 2013 melalui <http://dprd-sidoarjoab.go.id/tentang-dprd/produk-hukum> diakses tanggal 7 April 2015

PERMENDAGRI NO 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Desa melalui [http://kamuskeuangaerah.com/index.php/Berkas:Permendagri_37_tahun_2007_\(Keuangan_Desa\).pdf](http://kamuskeuangaerah.com/index.php/Berkas:Permendagri_37_tahun_2007_(Keuangan_Desa).pdf) diakses tanggal 7 April 2007

JURNAL

Oni Nugrianti Dan Zulkarnaini , 2013,Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Dana,Fisip Universitas Riau, Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A. Prof. Dr. Ir. Hj. Keppi Sukesi, M.S. Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A., Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kota

Malang: Dalam Perspektif Kajian Budaya Trisakti Handayani
(Trisakti@Umm.Ac.Id)

Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Desa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu
Administrasi, Universtas Brawijaya, Malang

Ramandita Shalfiah , Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Dalam Mendukung Program- Program Pemerintah Kota Bontan Ejournal Ilmu
Pemerintahan, Ejournal.Ip.Fisip.Unmul.Ac.Id

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Kepala Desa

1. Apa kegunaan dana ADD yang diberikan pemerintah pak untuk Desa?
2. Bagaimana pelaksanaan ADD di Desa Sidodadi ini Pak?
3. Program-program pemberdayaan apa saja yang berasal dari ADD Desa Sidodadi ?
4. Untuk pemberdayaan pemberdayaan perempuan apakah hanya PKK yang melaksanakan di Desa Sidodadi?
5. Langkah-langkah apa saja yang masih perlu dilakukan untuk melakukan pemberdayaan perempuan di Desa Sidodadi?

Untuk Ketua Tim Penggerak PKK

1. Bagaimana Pendapat Ibu tentang ADD dari pemerintah untuk kegiatan pemberdayaan di Desa Sidodadi?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan perempuan yang di laksanakan PKK di Desa Sidodadi?
3. Program-program apa saja yang dilaksanakan dalam program PKK untuk pemberdayaan perempuan?
4. Bagaimana cara PKK untuk memberi pemberdayaan perempuan di Desa Sidodadi?

5. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan?

Untuk Anggota PKK

1. Apa tujuan Ibu mengikuti PKK di Desa Sidodadi?
2. Apakah Ibu senang mengikuti kegiatan PKK di Desa Sidodadi yang bertujuan untuk memberikan pemberdayaan untuk perempuan?
3. Bagaimana penilaian Ibu terhadap PKK di Desa Sidodadi?
4. Apakah program pemberdayaan yang dilakukan PKK selama ini bermanfaat untuk Ibu?
5. Menurut Ibu apa faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di PKK?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Di Lapangan



Kegiatan rutin PKK dan Pemberdayaan Desa Sidodadi Kecamatan Candi



Peran PKK Pemberdayaan Lansia





Peran PKK Pemberdayaan Ibu Hamil





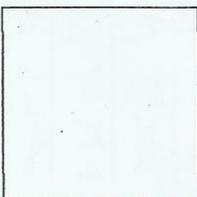
KETENTUAN² KEPEMBIMBINGAN SKRIPSI

1. Setiap konsultasi kartu ini harap dibawa dan diserahkan kepada Pembimbing untuk ditandatangani.
2. Jika penulisan (Kepembimbingan) Skripsi belum selesai, sedangkan periode masa pembimbingan telah berakhir, mahasiswa diwajibkan melapor ke fakultas dengan membawa kartu konsultasi ini.
3. Pembimbing dimohon melaporkan mahasiswa bimbingannya yang tidak aktif kepada fakultas.
4. Kartu konsultasi ini tidak berlaku untuk 1 (satu) periode Kepembimbingan.
5. Mahasiswa yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan diatas akan ditangguhkan pelaksanaan bimbingan dan atau Ujianya.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
Prodi Ilmu Komunikasi (S1) Terakreditasi Nomor : 027/BAN-PT/UK-XI
Prodi Ilmu Administrasi Negara (S1) Terakreditasi Nomor : 045/BP
XII/S/1/II/2010
KAMPUS I : Jl. Mojopahit 666-B Telp. 031-8945444, 8928097, Faks. 031-8945444
Sidoarjo - 61215

KARTU KONSULTASI SKRIPSI



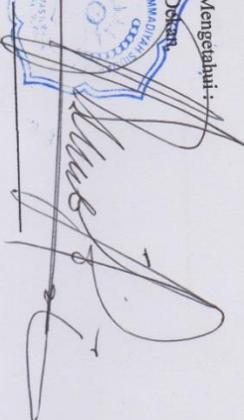
Nama : Hilmi Rahmayanti
NIM : 112020100001
Fak./Jurusan : di SIP / Ilmu Administrasi, Negara
Periode : _____
Pembimbing : Dr. Dra. Luluk Fauziah, M.Si
Judul : Pemberdayaan perempuan melalui
Alokasi Dana Desa (studi tentang
Peran PKK di Desa Sidobagis Kecamatan
Candi Kabupaten Sidoarjo)

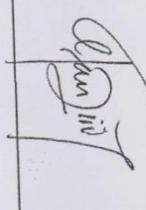
Sidoarjo, _____

No.	Tgl	Materi Konsultasi	Saran / Petunjuk Pembimbing	Paraf Pem	Catatan
1	19/11	Menganalisa soal-soal dan persiapan	Revisi soal 1	Ma	Revisi
2	26/11	Bab 1 dan bab 11	Revisi Bab 1	Ma	Revisi dan perbaikan
3	6/11	Bab 11 dan bab 12	ACC / Revisi	Ma	Revisi
4	17/11	Quis tentang kecerdasan	ACC / Revisi	Ma	Revisi dan perbaikan
5	22/11	Met Pen	ACC / Revisi	Ma	Revisi dan perbaikan
6	22/11	Met Pen	ACC / Revisi	Ma	Revisi dan perbaikan
7	10/12	on Brain Teori	ACC / Revisi	Ma	Revisi dan perbaikan
8	10/12	perbaikan	ACC / Revisi	Ma	Revisi dan perbaikan
9	20/12	perbaikan	ACC / Revisi	Ma	Revisi dan perbaikan

No.	Tgl	Materi Konsultasi	Saran / Petunjuk Pembimbing	Paraf Pem	Catatan
10	6/12	Pengantar	ACC / Revisi	Ma	Revisi dan perbaikan
11	27/12	Pengantar	ACC / Revisi	Ma	Revisi dan perbaikan
12	24/12	konsep dan konsep	ACC / Revisi	Ma	Revisi dan perbaikan

Mengetahui:

 Pembimbing

 Sidorjo



KEGIATAN MAHASISWA UMSIDA
VOICE CLUB

Sertifikat

di berikan kepada :

Hilmi Rochmayanti

Atas Partisipasinya Dalam Kegiatan
BAKTI SOSIAL UVC
Sebagai **Sekretaris I**

Desa Pucukan-Gebang, Kab.Sidoarjo
Sidoarjo, 23 November 2011

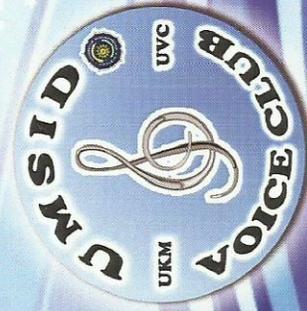


EMBINA UKM
UMSIDA VOICE CLUB

KETUA PELAKSANA
BAKTI SOSIAL UVC

KETUA UMUM
UMSIDA VOICE CLUB

UNIT KEGIATAN MAHASISWA UMSIDA
VOICE CLUB



Sertifikat

di-berikan kepada :

Hilmi Rochmayanti

Sebagai Peserta

DIKLAT KEANGGOTAAN UMSIDA VOICE CLUB

“Low Uls”

VILLA GREEN PEACH, CLAKET, TRAWAS

14-15 Januari 2012



Sertifikat

di berikan kepada :

Filmi Rochmayanti

Atas Perannya Dalam Kepengurusan Sebagai
BENDAHARA II

Unit Kegiatan Mahasiswa

Umsida Voice Club Periode 2011-2012

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Sidoarjo, 16 Januari 2012

PEMBINA UKM
UMSIDA VOICE CLUB

EVIE DESTIANA, S.Sn, M.Ed.
NIDN. 0707128004

KETUA UMUM
UMSIDA VOICE CLUB

LUKMAN HAKIM
NIM. 092022000016

**UNIT KEGIATAN MAHASISWA UMSIDA
VOICE CLUB**

Sertifikat

di berikan kepada :

Hilmi Rochmayanti

Atas Perannya Dalam Kepengurusan Sebagai
DEVISI HUMAS

Unit Kegiatan Mahasiswa

Umsida Voice Club Periode 2013-2014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Sidoarjo, 25 Maret 2013



CONFERENCE

ORDER, IDENTITY
POST-WESTERN WORLD

Organized by :



UNIVERSITAS GADJAH MADA



Institute of
International
Studies
INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS
AND DIPLOMACY



THE UNIVERSITY
OF QUEENSLAND
ESTABLISHED 1907

Certificate of Participation

This is to certify that

Hilmi Rochmayanti

has fully participated as

AUDIENCE

during Conference and Beyond: Rethinking International Order, Identity, Security,
and Justice in A Post-Western World” at Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

8 - 9 April 2015.

Conference Chair,

**UNIT KEGIATAN MAHASISWA UMSIDA
VOICE CLUB**

Sertifikat

di berikan kepada :

Hilmi Rochmayanti

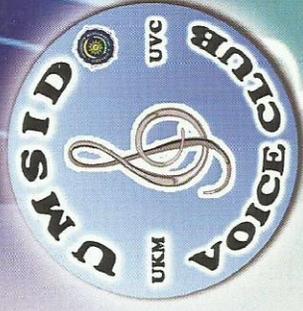
Atas Perannya Dalam Kepengurusan Sebagai
BENDAHARA I

Unit Kegiatan Mahasiswa

Umsida Voice Club Periode 2012-2013

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Sidoarjo, 31 Desember 2012





Certificate of Participation

This certifies that

Milini Rochmayanti

PARTICIPANT

has actively participated in

ASIAN -AFRICAN FORUM 2015

held in Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta April 30th 2015

Yogyakarta, April 30th 2015



KEGIATAN MAHASISWA UMSIDA
VOICE CLUB

Sertifikat

di berikan kepada :

Ilmi Rochmayanti

Atas Perannya Dalam Kepanitiaan

Sebagai **Bendahara SUU US**

AT KEANGGOTAAN UMSIDA VOICE CLUB

«**Suu Us**»

VILLA WAHYU, PACET, MOJOKERTO

23-24 MARET 2013

PEMBINA UKM

KETUA PELAKSANA

